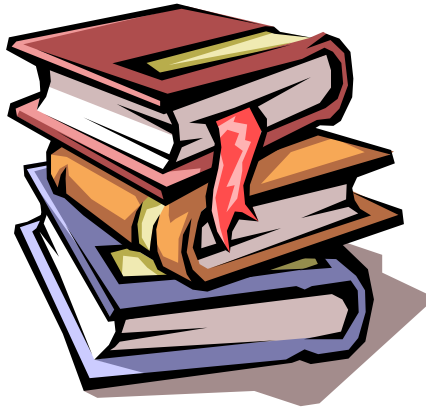


Seri Dokumentasi 002

Ahmad Sarbini

# NILAI TAUHID DAN PROFESIONALISME DA'I



Penyunting: Cik Hasan Bisri

MADRASAH MALEM REBOAN

## Pengantar Penyunting

Tulisan Dr. Ahmad Sarbini tentang “Nilai Tauhid dan Profesionalisme Da’i” didiskusikan tanggal 20 Agustus 2013. Ia berasal dari disertasi yang dipertahankan di Universitas Pendidikan Indonesia. Ia merupakan bagian dari pembahasan teori yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan disertasi tersebut. Ada dua konsep yang dihubungkan, yakni **nilai tauhid** dan **profesionalisme da’i**. Kedua konsep tersebut, dengan meminjam istilah Hamudah ‘Abd al-‘Athi, relasi kedua konsep itu dapat diidentifikasi sebagai “teori” yang bersifat normatif-moralistis. Suatu teori yang deduksi dari unsur informasi yang sangat abstrak, termasuk aspek normatif yang bersumber dari keyakinan yang dianut oleh penelitiannya.

Dr. Ahmad Sarbini, menyatakan bahwa “nilai tauhid yang tertanam pada diri da’i tidak hanya mampu menjadikan para da’i berjihad merdeka dan mandiri, tapi juga mampu menjadi pendorong para da’i untuk melakukan gerakan dakwah secara profesional. Pengakuan kebenaran yang tulus atas ungkapan *lā ilāha illallāh* yang berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah merupakan deklarasi kemerdekaan yang paling tinggi bagi para da’i”. Da’i yang telah istiqamah dalam bertauhid akan merasakan seluruh hidup dan aktivitasnya tidak lain sebagai ibadah kepada Allah. Pribadi seperti ini akan mempunyai sikap dan karakter tanggung jawab yang tinggi, jujur, amanah, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko, optimis dan berorientasi ke masa depan, di samping ia mempunyai jiwa yang teguh, sabar, dan tawakal kepada Allah. Sifat-sifat atau karakter seperti inilah yang tidak lain merupakan sifat-sifat atau karakter dari seorang yang profesional.

Tanggapan dan komentar terhadap makalah Dr. Ahmad Sarbini terjadi tidak hanya di ruang diskusi. Hal itu berhubungan dengan pemberitaan media massa tentang penentuan tarif di kalangan da’i kondang, yang mendapat sorotan publik. Bahkan mengundang kon-

troversi. Hal ini tampak pula dalam tanggapan dan komentar yang disampaikan dalam dokumen ini. Tanggapan tersebut, di antaranya, menghubungkan antara gagasan yang ideal tentang dai dengan realitas kehidupan masyarakat yang sedang mengalami perubahan.

Tanggapan tertulis Prof. Dr. H. Asep S. Muhtadi disampaikan pada saat diskusi di Pusat Komputer UIN Bandung. Sedangkan tanggapan Dr. H. Nurrohman Syarif dan Dr. Abdul Syukur disampaikan melalui tulisan yang sengaja dikirim ke tata usaha MDMR. Sementara itu, tanggapan Drs. Moeflich Hasbullah, MA dan Dr. H. Karman disampaikan melalui *facebook* Forum Komunikasi Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung (FKDU).

Semua tanggapan dapat memperkaya wacana dakwah yang sedang mengalami perkembangan signifikan. Dakwah, sebagai bidang kajian tak hanya menjadi perhatian para pakar ilmu dakwah, tetapi juga para peminat lain. Gejala dakwah dapat dikaji dengan menggunakan jasa ilmu lain, terutama ilmu-ilmu sosial. Berkenaan dengan hal itu, pada bagian akhir dimuat tulisan saya, sebagai makalah pendamping, tentang “Menuju ke Arah Perumusan Model Penelitian Dakwah”. Diharapkan, kajian dakwah tak cukup hanya dilakukan secara normatif-moralistik, tetapi juga diperkaya oleh kajian empiris dengan pendekatan antropologis-sosiologis yang diangkat dari entitas kehidupan Muslim khususnya di Indonesia.

Dengan cara demikian, ilmu dakwah akan menjadi penghubung antara rumpun ilmu-ilmu agama dengan rumpun ilmu-ilmu sosial yang berbasis pada psikologi, sosiologi, dan antropologi, kemudian komunikasi. Dewasa ini kajian dakwah secara interdisipliner menjadi keniscayaan meskipun hal itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Kajian ini memerlukan pengorganisasian berbagai unsur ilmu dalam suatu kegiatan. Hal yang sama, perlu koordinasi para pengkajinya.

Bandung, 18 Pebruari 2014

Cik Hasan Bisri

## Daftar Isi

Pengantar Penyunting	— 1
Daftar Isi	— 2
A. Pendahuluan	— 4
B. Makna Nilai Tauhid	— 11
C. Makna Profesionalisme Da’i	— 14
D. Nilai Tauhid dan Profesionalisme Da’i	— 18
Daftar Pustaka	— 21
Tanggapan Tertulis	
1. Asep S. Muhtadi	— 25
2. Nurrohman Syarif	— 27
3. Moeflich Hasbullah	— 28
4. Karman	— 29
5. Abdul Syukur	— 31
Makalah Pendamping	
Cik Hasan Bisri	
“Menuju ke Arah Perumusan Model Penelitian Dakwah”	— 33
A. Pendahuluan	— 33
B. Dakwah sebagai Sasaran Penelitian	— 34
C. Wilayah Penelitian Dakwah	— 38
D. Peragaan Model Penelitian	— 47
E. Penutup	— 57
Daftar Pustaka	— 60

## A. Pendahuluan

Makalah ini merupakan bagian bab kajian teori dari disertasi Penulis tentang *Pengembangan Model Pendidikan Nilai Tauhid dalam Pembentukan Kader Da’i Profesional di Lembaga Pendidikan Tinggi Dakwah*. Menurut hemat Penulis, di samping untuk kepentingan penajaman dan pendalaman, makalah ini amat menarik untuk didiskusikan mengingat beberapa hal sebagaimana berikut ini.

Pertama, dalam perspektif teori ilmu keislaman, khususnya ilmu dakwah, nilai tauhid merupakan inti ajaran Islam. Ia merupakan sumber inspirasi dari totalitas proses pembentukan da’i profesional, yang tidak mungkin profesionalisme da’i terwujud tanpa penanaman nilai tauhid yang baik.<sup>1</sup> Di sisi lain, profesionalisme merupakan kualitas yang wajib dimiliki setiap orang yang menekuni bidang keahlian tertentu, termasuk keahlian dakwah.<sup>2</sup> Karena itu, mewujudkan da’i profesional, dalam istilah ilmu dakwah disebut *takwīn al-du’āt* atau *tarbiyah al-du’āt*, merupakan bagian dari realisasi perintah kewajiban dakwah dalam al-Qur’an. Perintah ini sebagaimana terkandung dalam kalimah *ولكن* dan *كنتم* yang memberikan petunjuk *amar takwīn* (perintah pembentukan) tenaga da’i terdidik dan terlatih dalam melakukan tugas dakwah, yang dalam istilah lain disebut da’i profesional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Teori ini diperkuat oleh perspektif teori lain dalam kajian teologi Islam yang menegaskan bahwa keyakinan atau akidah (baca: tauhid) adalah unsur yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Ia merupakan referensi bagi suatu tindakan, dalam arti bahwa sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan, dia hampir selalu menimbanginya dengan keyakinan yang dimilikinya. Dengan demikian, akidah tidak saja berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku perorangan, tetapi juga dapat mewarnai interaksi sosial dalam berbagai aspek kehidupan (Afif Muhammad, *Dari Teologi ke Idiologi: Telaah atas Metode dan Pemikiran Teologi Sayyid Quthb*, 2004, hlm. 1).

<sup>2</sup> Muhammad Imadudin ‘Abdulrahim, “Profesionalisme dalam Islam, dalam *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan* Nomor 4, 1993, hlm. 52-53.

<sup>3</sup> Syukriadi Sambas, *Pemikiran Dakwah Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar*, Sinopsis Disertasi, 2009, hlm. 2.

Kedua, terkait dengan masih terdapatnya beragam problem internal yang dihadapi para da'i, yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada profesionalisme mereka dalam melakukan tugas dakwah. Problem ini misalnya: (1) problem kognisi, meliputi wawasan, pengetahuan, logika, dan kecerdasan, yang menjadi sumber kepercayaan masyarakat terhadap para da'i; (2) problem skill, meliputi keterampilan, ketangkasan, dan kepantasan dalam melakukan tugas dakwah; (3) problem kepribadian, meliputi kewibawaan, spiritualitas, keteladanan, daya juang, penampilan, ketawaduan, keikhlasan, kelembutan, keberanian dan ketegasan dalam melaksanakan dakwah; (4) problem psikologis, meliputi kesadaran sebagai da'i, kesiapan, ketenangan, kesejukan, dan kedamaian yang dirasakan seorang da'i; (5) problem keluarga, berkaitan dengan harmonisasi dan dukungan keluarga terhadap profesi yang digeluti para da'i; (6) problem ekonomi, terkait dengan kesejahteraan para da'i. Pembahasan topik tentang nilai tauhid dan profesionalisme da'i ini antara lain diarahkan untuk meminimalkan atau setidaknya untuk menguatkan kesadaran tentang masih terdapat sejumlah problem internal yang dihadapi para da'i yang harus dipikirkan dan diatasi bersama.

Ketiga, ada kecenderungan di kalangan masyarakat umum bahwa profesi dakwah atau tabligh dipahami sebagai profesi yang bersifat "terbuka", dalam arti dapat dilakukan oleh "siapa saja", dengan dalil: *ballighū annī wa law āyah*. Malah mungkin oleh sebagian orang dianggap sebagai profesi alternatif, untuk tidak mengatakan "profesi pelarian", ketika sudah mentok mendapatkan pekerjaan lain lalu mereka memilih jadi da'i atau mubaligh. Sehingga sekarang ini para da'i atau mengklaim diri sebagai da'i tidak hanya lahir dari kalangan pesantren (dalam hal ini para santri dan kyai) atau dari lembaga-lembaga pendidikan dakwah, tapi juga lahir dari berbagai kalangan yang bervariasi: politisi, artis, seniman, budayawan, mantan pejabat, komedian, dan lain-lain. Kemunculan para da'i dari berbagai kalangan ini di satu sisi memang amat menggembirakan. Kare-

na aktivitas dakwah menjadi sedemikian semarak dan bervariasi, sehingga “terkesan” tidak jenuh dan dapat menyentuh berbagai kalangan. Akan tetapi di sisi lain, tidak jarang juga memunculkan problem kepribadian (inkonsistensi perilaku ketika berperan sebagai da’i dan di luar da’i)<sup>4</sup> dan disorientasi hakikat dakwah Islam (penyimpangan orientasi dakwah semisal untuk popularitas atau meraup keuntungan duniawi).<sup>5</sup> Terlebih ketika aktivitas dakwah ini sudah disentuh oleh budaya pop dan kepentingan media.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kepribadian antara lain dimaknai: kualitas tingkah laku total individu (Woodworth); sistem yang relatif stabil mengenai karakteristik individu yang bersifat internal, yang berkontribusi terhadap pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang konsisten (Derlega, Winstead dan Jones); *personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment*, kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam diri individu tentang sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian secara unik terhadap lingkungannya (Gordon W. Allport). Lihat: Syamsu Yusuf L. N dan A. Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, 2008, hlm. 3-4; Elizabeth B. Hurlock, *Personality Development*, 1986, hlm. 6-8). Dalam aktivitas dakwah, kepribadian da’i merupakan hal yang amat mendasar, dan terkait erat dengan keberhasilan dakwah. Beragam fakta historis menjelaskan bahwa keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh para da’i, mulai dari pusat Islam di Mekkah hingga ke dataran Nusantara, secara menonjol amat dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki para da’i: terutama yang terkait dengan integritas moral, kedalaman ilmu, keberanian, ketekunan, kesabaran, ketawakalan, kesederhanaan, dan keikhlasan. Dengan kepribadian ini, mereka tidak hanya amat bijaksana, penuh kasih dalam bertegur sapa, sopan santun dalam bertutur kata, tapi juga amat sederhana dan ikhlas dalam memberikan pencerahan kepada sesama. Sehingga tanpa terasa lambat-laun masyarakat pun larut pada pesan-pesan dakwah yang ditawarkan. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, 1988; Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*, terjemahan Yudian W. Asmin dan H. Afandi Mochtar, 1996; Widji Saksono, *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Wali Songo*, 1995; dan Thomas W. Arnold, *Sejarah Dakwah Islam*, terjemahan H. A. Nawawi Rambe, 1979.

<sup>5</sup> Ketika hal ini terjadi, maka para pelaku dakwah sesungguhnya, seperti diprediksi Rasulullah Saw., tengah berada diambang pintu-pintu neraka jahanam (*du’atun ‘alā abwābi jahannam*), dan barangsiapa mengikuti seruannya sama-sama akan dihempaskan ke dalam neraka (*man ajābahum ilayhā qadzafūhu fīhā*). Ciri-ciri mereka itu kata Rasulullah Saw.: *qaumun min jildatinā wa yatakallamūna bialsinatīnā*, mereka tampak seperti Islam hanya pada tataran kulit luar dan kata-katanya saja, sementara hati mereka kufur dan memperturutkan hawa nafsu; amat sering berbicara tentang Islam dan mengambil keuntungan duniawi dari pembicaraannya tapi tidak mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk mengamalkan ajaran Islam serta

Ketika aktivitas dakwah sudah tersentuh budaya pop dan kepentingan media, maka logika dakwah pun berubah mengikuti budaya pop dan cara berpikir media. Ukuran da'i layak tayang adalah popularitas, kepasihan berbicara, keterampilan pentas di atas panggung, dan penampilan yang menarik atau bahkan nyentrik yang dapat menyedot perhatian para pebisnis untuk memasang iklan. Sementara mutu keislaman para da'i, terutama yang terkait dengan kepribadian, akhlak, dan kedalaman penguasaan ilmu-ilmu keislaman kurang menjadi tekanan. Akhirnya, tidak jarang kepasihan berbicara dan keterampilan menyanyikan lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu India mengalahkan kepasihan dan keterampilan membaca al-Qur'an dan hadits. Aura cahaya kesalehan, ketawaduan, dan keikhlasan, yang semestinya muncul dari para da'i dikalahkan oleh cahaya sorot kamera dan *make-up* dari para juru rias. Kehidupan pribadi para da'i yang biasanya sangat rahasia dan tabu diketahui umum, sekarang tempat tidur, kamar mandi, dan gosip-gosipnya pun dibebarkan secara terbuka ke muka umum oleh sorot kamera di media masa. Hubungan da'i dan jamaahnya berubah seperti hubungan fans dengan artis idolanya. Asesori da'i pun bertambah, tidak hanya mobil mewah dan rumah mewah, tapi juga ditambah dengan dampingan seorang manajer. Kehidupan harian para da'i tidak mencerminkan kehidupan rata-rata jamaahnya: mereka adalah komunitas elite, komunitas jet set, komunitas yang menjadi sebatas mimpi bagi kehidupan kebanyakan para jamaah.<sup>7</sup>

Keempat, model-model dakwah yang berkembang secara umum dinilai belum mampu membaca akar permasalahan umat secara cermat dan menemukan langkah-langkah memecahannya secara tepat, terutama yang terkait dengan rendahnya kualitas moral masyarakat.

---

berkorban harta dan jiwa untuk menegakkan syariat Islam (H.R. Bukhari dan Muslim dari Khuzaifah). Lihat juga Q.S. al-Baqarah, 2: 16, 41, 42, 44 dan al-Shaf, 61: 2-3.

<sup>6</sup> Rahman, M.T., 1996. Menda'wahkan Islam pada Dunia.

<sup>7</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Mubaligh Pop, dalam Reformasi Sufistik*, 2002, hlm. 339-342.



Malah, model-model dakwah yang dilakukan cenderung dominan mengembangkan tradisi dakwah lisan. Pada pokoknya, meminjam istilah Yudi Latif<sup>8</sup>, model-model dakwah yang ada masih berkutat di lingkaran dakwah “cuap-cuap” yang kedalamannya, menurut istilah hadits, tidak sampai ke tenggorokan apalagi sampai ke ulu hati. Tradisi dakwah cenderung lebih merupakan ajang masyarakat “menanggap” da’i idolanya secara pasif daripada menjadi sarana mereka untuk mengkaji dan bertindak secara aktif. Jamaah dipandang sebagai wadah kosong yang harus diisi dengan keyakinan dan nilai-nilai moral. Da’i berbicara, hadirin mendengarkan. Da’i berpikir, hadirin dipikirkan. Da’i mengatur, hadirin diatur, dan seterusnya. Dalam konteks ini, para da’i baru bisa menyampaikan apa yang mereka miliki dan menyatakan apa yang mereka inginkan, tapi tidak memahami apa sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, tidak mengherankan jika beragam forum dakwah seringkali tidak mampu membangkitkan minat-minat eksploratif serta kreativitas berpikir kritis, sesuatu yang sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk membangun tradisi intelektual dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, lanjut Latif, logika dakwah demikian keberhasilannya diukur oleh kuantitas jumlah pengunjung, sedangkan pertanyaan seputar masalah bagaimana perkembangan masyarakat sebagai sasaran dakwah jarang diungkap. Malah proses dakwah yang berkembang lebih banyak “menguntungkan” para da’i daripada jamaah yang diserunya. Betapa banyak da’i yang dilambungkan status sosial, ekonomi, dan politiknya setelah laris “dipakai” berbagai majelis taklim. Namun tidak demikian halnya dengan keadaan masyarakat awam, mereka tetap terpinggirkan, miskin, dan memprihatinkan. Sehingga proses dakwah hanya melahirkan struktur masyarakat

---

<sup>8</sup> Yudi Latif, “Menuju Transformasi Dakwah Islam I: Masih Berkutat di Lingkungan Cuap-cuap”, 2000.

baru di mana para da'i menjadi elite sementara umat yang diserunya tetap berada pada lapisan bawah.

Menurut Amrullah Ahmad,<sup>9</sup> melembaganya tradisi dakwah seperti ini semakin didukung oleh suatu anggapan di kalangan sebagian pemikir dan pelaku dakwah bahwa dakwah hanyalah "upaya penyampaian". Urusan apakah masyarakat berubah atau tidak, itu bukan urusan para pelaku dakwah. Tapi itu semuanya tergantung pada hidayah Allah. Anggapan dasar yang diambil dari pemahaman terhadap al-Qur'an ini pada titik yang paling akhir memang benar. Tapi masalahnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu masyarakat tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mau mengubahnya (Q. S. al-Ra'd, 13: 11).

Oleh karena itu, lanjut Amrullah, anggapan dasar yang telah melembaga ini cenderung lebih bersifat apologis atas bermacam kegagalan dakwah yang tidak lagi relevan dengan tantangan-tantangan yang ada. Sebab pernyataan itu lebih tepat sebagai kata akhir dari usaha dakwah ketika semua jalan untuk mengubah keadaan masyarakat sudah tertutup, yang fungsinya agar para pelaku dakwah tidak putus asa. Dengan demikian, bila sampai saat ini anggapan dasar itu masih dijadikan sebagai landasan etos gerakan dakwah Islam, maka tidak mustahil umat Islam akan terjangkit budaya kemalasan berpikir dan kemalasan bertindak dalam kehidupan masyarakat.

Inti gerakan dakwah adalah upaya penyadaran agar masyarakat mau mengkaji, berpikir, dan bertindak. Dengan demikian, dalam konteks ini, dakwah sama sekali bukan semata kegiatan penyampaian atau kegiatan mengindoktrinasi sesama mengenai kandungan-kandungan ajaran suci Islam, melainkan suatu gerakan penyadaran masyarakat untuk melakukan perubahan, di mana masyarakat berposisi sebagai subjek sementara posisi para da'i sebagai "fasilitator" perubahan.

---

<sup>9</sup> Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, 1983, hlm. 6-7.

Untuk sampai pada upaya penyadaran untuk perubahan ini, maka gerakan dakwah yang dilakukan perlu menempuh beberapa langkah sebagai berikut ini. Pertama, memberi atau memfasilitasi ruang kebebasan kepada masyarakat untuk mengubah keadaan dirinya. Pada tataran ini dibangun kesadaran bahwa sesungguhnya semua anggota masyarakat adalah da'i bagi dirinya sendiri, yang tak mungkin terjadi perubahan berarti bila ia tidak mau mengubah apa yang ada pada dirinya. Kedua, menciptakan forum-forum dakwah sebagai sebuah sarana dialog untuk membangkitkan potensi masyarakat sebagai makhluk kreatif. Sehingga terbangun kesadaran bahwa mereka diciptakan Allah untuk berkemampuan mengelola diri dan lingkungannya dengan kekuatan **intelegensi**, **kreativitas**, dan **imajinasinya** sendiri. Dengan begitu esensi dakwah justru tidak mencoba mengubah masyarakat, tapi menciptakan suatu kesempatan sehingga masyarakat akan mengubah dirinya sendiri. Karena itu, da'i yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah para da'i yang mampu menciptakan dialog-dialog konseptual, yang memberikan kesempatan kepada umat untuk menyatakan pandangannya, merencanakan dan mengevaluasi perubahan sosial yang dikehendakinya, serta secara bersama-sama menikmati hasil proses dakwah yang dilakukannya.<sup>10</sup>

Dengan cara seperti ini, secara kultural, proses dakwah tidak hanya mampu membangun kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk melakukan perubahan, tapi juga akan mampu mengembalikan dan mengembangkan lima tradisi penting dalam kehidupan masyarakat seperti yang digagas Kuntowijoyo<sup>11</sup>, yakni: tradisi rasional, tradisi egalitarian, tradisi berbudaya, tradisi ilmiah, dan tradisi kosmopolitan. Ragam tradisi mencerminkan masyarakat yang maju dan berperadaban.

---

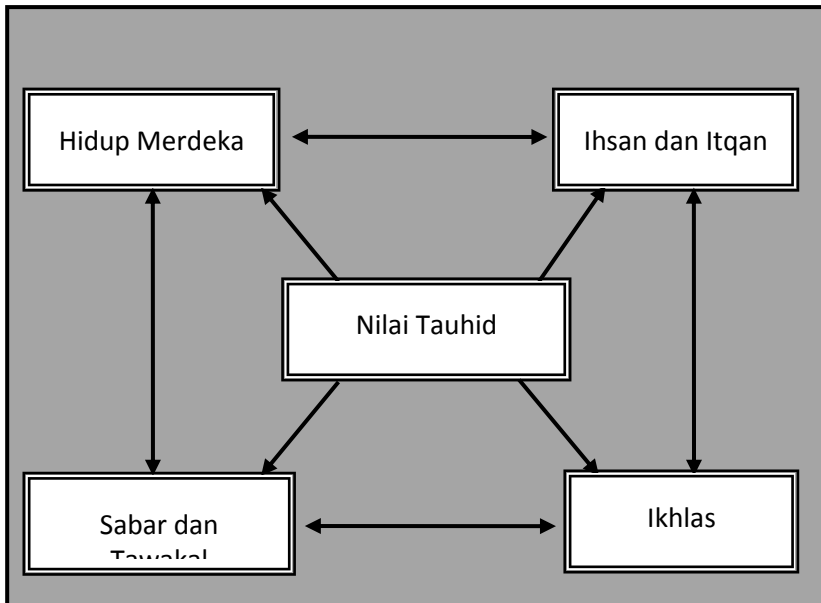
<sup>10</sup> Yudi Latif, "Menuju Transformasi Dakwah Islam III: Perpustakaan sebagai Garda Informasi", 2000.

<sup>11</sup> S. M. Amin, *Ilmu Dakwah*, 2009, hlm. 163.

## B. Makna Nilai Tauhid

Nilai tauhid memiliki makna dan lingkup yang amat luas. Ia meliputi aspek kognisi, afeksi, dan psikomotor. Lingkup ini merujuk pada makna tauhid itu sendiri yang tidak sebatas percaya kepada Allah atau mempercayai akan wujud Allah sebagai pencipta alam semesta, melainkan juga mencakup ketundukkan, keikhlasan, kedekatan, dan kecintaan terhadap Allah yang harus terintegrasi pada perkataan, sikap, keyakinan, dan perbuatan. Secara skematis indikasi nilai-nilai ketauhidan ini dapat dilihat dalam Gambar 1.

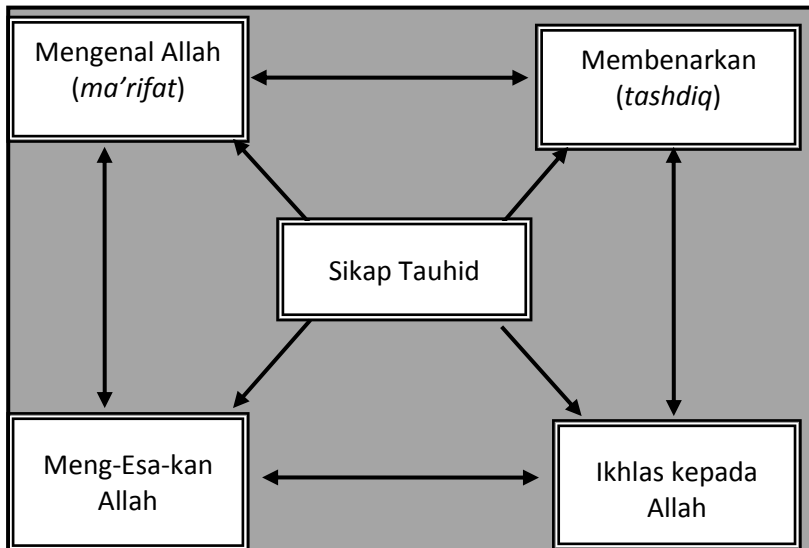
Gambar 1: Indikasi Nilai Ketauhidan



Berdasar skema nilai dan sikap ketauhidan tersebut, amat jelas bahwa bertauhid tidak cukup hanya percaya kepada Allah, tetapi mencakup pula pengertian yang benar tentang siapa Allah yang di-

percaya itu dan bagaimana seseorang seharusnya bersikap kepadanya serta kepada objek-objek selain Dia. Sebab kalau sebatas percaya kepada Allah, maka orang-orang musyrik Makkah yang memusuhi Nabi Saw. pada masa lalu pun adalah juga kaum yang benar-benar percaya kepada Allah (Q.S. al-Zumar, 39: 38; al-Ankabut, 29: 63). Namun, mereka tidak disebut sebagai kaum beriman (*al-mu'minūn*) dan karenanya juga tidak disebut sebagai kaum yang bertauhid (*al-muwahhidūn*). Sebaliknya, mereka disebut kaum yang mempersekutukan Allah (*al-musyrikūn*), yakni kaum yang menganut paham bahwa Allah mempunyai sekutu atau oknum yang menyertainya dalam hal-hal keilahian. Padahal mereka mengakui dan sadar betul bahwa sekutu dalam keilahian Allah itu adalah juga merupakan ciptaan Allah, sesama makhluk seperti manusia.<sup>12</sup>

Gambar 2: Indikasi Sikap Ketauhidan



<sup>12</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, 1992, hlm. 74-75.

Dari sistem kepercayaan kaum musyrik di atas dapat diambil sebuah pemahaman yang pasti bahwa hanya percaya kepada Allah tidak dengan sendirinya seseorang berarti telah bertauhid. Sebab percaya kepada Allah itu masih mengandung kemungkinan untuk percaya kepada yang lain-lain sebagai penyerta (*syarik*) Allah dalam keilahian yang kemudian membuat kepercayaan manusia kepada Allah menjadi tidak murni, dan inilah problem utama umat manusia. Di antara manusia memang ada yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan, yakni kaum atheis. Tetapi mereka adalah kaum yang amat minoritas dalam masyarakat manapun, termasuk dalam masyarakat di negeri-negeri komunis yang secara resmi menyatakan berideologi ateis, karenanya paham mereka tidak menjadi problem utama umat manusia. Malah dalam kajian ini, atheisme pun sesungguhnya merupakan bentuk lain dari syirik. Sebab jika diperhatikan bahwa semua mereka yang mengaku atheis, yakni menolak adanya Tuhan, dalam praktiknya bertuhan juga, karena mereka memutlakkan sesuatu yang menyerupai pemuatlakkan terhadap Tuhan. Hal ini seperti pemuatlakkan mereka terhadap para pemimpin dan pikiran-pikiran para pemimpinnya. Karenanya, dalam pembahasan ilmu-ilmu sosial banyak yang memandang bahwa komunisme atau atheisme itu merupakan padanan dari agama atau *religion equivalent*.<sup>13</sup>

Syirik menjadi problem utama umat manusia karena sekalipun kepercayaannya berpusat kepada Allah, namun masih membuka peluang bagi adanya kepercayaan kepada wujud-wujud lain yang dianggap bersifat ketuhanan atau *ilāhī*, meski ia derajatnya lebih rendah dari Allah sendiri. Oleh karena itu, amat wajar bila program pokok Alqur'an adalah membebaskan manusia dari belenggu syirik dengan mencanangkan dasar kepercayaan yang diungkapkan dalam kalimat yang mengandung makna negasi dan konfirmasi (*al-nafy wa al-istbāt*) yakni *lā ilāha illallāh*, tidak ada Tuhan selain Allah.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

### C. Makna Profesionalisme Da'i

Istilah *profesional* atau *profesionalisme* secara kebahasaan berasal dari kata dasar yang sama, yakni “profesi”, terjemahan dari kata *profession* (Inggris) atau *professie* (Belanda) yang keduanya berasal dari kata *professio* (Latin). Arti harfiahnya ialah “pernyataan” atau “pengakuan”.<sup>14</sup> Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa profesional atau profesionalisme menunjuk pada pengertian tentang suatu keahlian yang didukung oleh kepandaian, kemampuan, dan keterampilan yang bersifat khusus dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesi tertentu, sehingga hasil pekerjaan itu menjadi benar-benar bermutu.<sup>15</sup>

Menurut Ahmad Tafsir<sup>16</sup>, profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Orang profesional adalah orang yang memiliki profesi. Dalam kaitan ini, setidaknya terdapat sepuluh kriteria bahwa suatu pekerjaan itu disebut profesi, sebagai berikut: (1) mengandung keahlian; (2) dipilih karena panggilan hidup; (3) memiliki teori-teori yang baku secara universal; (4) diperuntukan bagi kepentingan masyarakat; (5) dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif; (6) pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya; (7) mempunyai kode etik, yang disebut kode etik profesi; (8) memiliki segmen masyarakat (klien) pengguna jasa profesi secara jelas; (9) memiliki organisasi profesi, dan; (10) pemegang profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang yang lain.

Lanjut Tafsir, dari sejumlah kriteria profesi di atas, terdapat dua kriteria profesi yang pokok, yakni: **merupakan panggilan hidup** dan

---

<sup>14</sup> Abin Syamsudin Makmun, “Sistem Pendidikan dan Pengembangan Profesionalisme Guru”, dalam Fuad A. Hamied, dkk. (Ed.), *Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusi*, 2008, hlm. 134.

<sup>15</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2007, hlm. 911.

<sup>16</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, 2008, hlm. 107-112.

**merupakan suatu keahlian.** Kriteria lainnya hanya memperkuat kedua kriteria pokok ini. Kriteria **panggilan hidup** sebenarnya mengacu kepada pengabdian, yang untuk masa sekarang lebih umum dikenal dengan istilah **dedikasi**. Kriteria **keahlian** mengacu kepada mutu layanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **dedikasi** dan **keahlian** itulah ciri pokok suatu bidang disebut profesi. Kriteria lainnya, seperti **memiliki teori, kecakapan diagnostik** dan **aplikasi, otonomi, kode etik, organisasi profesi, dan mengenali hubungan profesi dengan bidang-bidang lain** dapat dikatakan merupakan kriteria untuk memperkuat **keahlian**. Sama halnya dengan kriteria **untuk masyarakat** dan **klien**, merupakan kriteria untuk memperkuat dan memperjelas **dedikasi**.

Selain itu, profesionalisme dipahami juga sebagai suatu kualitas yang dimiliki seseorang yang menekuni keahlian dalam bidang tertentu. Profesionalisme memiliki beberapa ciri. Pertama, mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kedua, mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Ketiga, mempunyai sikap berorientasi ke depan, sehingga memiliki kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Keempat, mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi (*'izzat al-nafs* atau *self-confidence*), serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.<sup>17</sup>

Sementara kata **da'i** dimaksudkan orang (individu atau kelompok) yang sengaja mempersiapkan diri untuk memegang atau me-

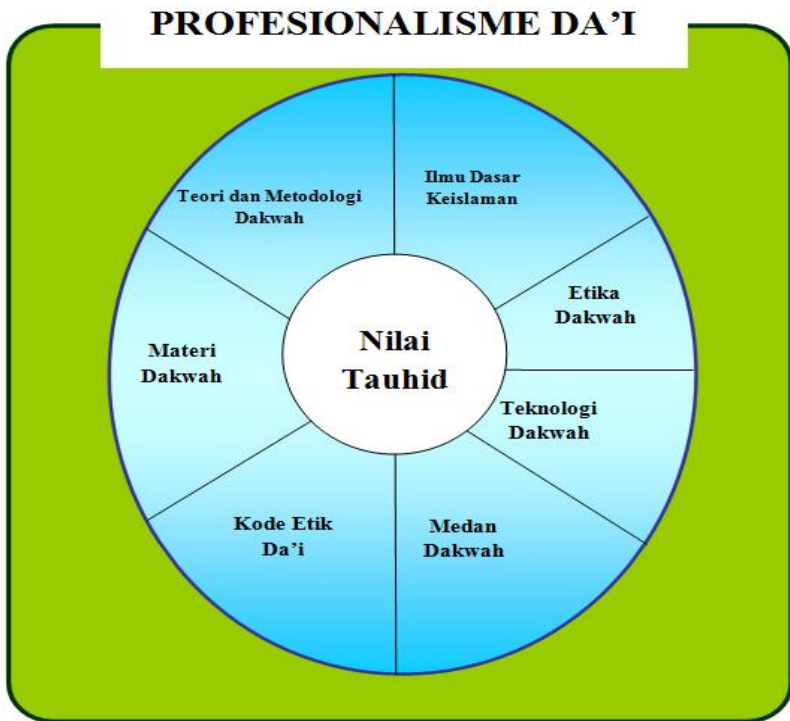
---

<sup>17</sup> 'Abdulrahim, *op. cit.*, hlm. 52-53.



lakukan tugas-tugas dakwah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan profesionalisme da'i adalah suatu kualitas yang dimiliki da'i berupa keahlian dalam bidang dakwah baik secara teoretik maupun praktik sehingga ia dipercaya masyarakat untuk melakukan tugas-tugas dakwah. Dengan demikian, dalam profesionalisme da'i terkandung unsur **pemahaman, penguasaan, kecakapan, kemampuan, dan ketangkasan** dalam menangani dan melakukan beragam aktivitas dakwah. Secara skematis, wilayah profesionalisme da'i ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3: Wilayah Profesionalisme Da'i



Selain istilah **profesionalisme da'i**, dikenal pula istilah **da'i profesional**. Da'i profesional menunjuk pada orang (individu atau kelompok) yang sengaja mempersiapkan diri untuk memegang atau melakukan tugas-tugas dakwah yang didukung oleh kepandaian, kemampuan, dan keterampilan khusus yang terkait dengan pelaksanaan dakwah. Muhammad Abduh menyebut da'i profesional sebagai *khawāsh al-ummah* (individu-individu terpilih dengan tugas sebagai da'i). Oleh karena itu, da'i profesional dapat dipahami sebagai da'i yang memiliki keahlian teoretik dan praktik yang berkaitan dengan pelaksanaan dakwah. Di mana keahlian ini diperoleh melalui *ta'lim* (transmisi ilmu), *tadrīs* (pembelajaran intensif), *tafaqquh* (pendalaman paham), *tazwīd* (pembekalan keahlian), dan *tadbīr* (pemberian keterampilan manajerial).<sup>18</sup>

Lanjut Abduh, da'i profesional lahir dari kelompok manusia yang mampu memfungsikan potensi *'aql* dan *nafs muthmainnah* dalam struktur *nafs insāniyah*. Sebab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya memiliki potensi *'aql*, *nafs muthmainnah*, *nafs lawwāmah*, dan *nafs ammarāh* dalam struktur *nafs insaniyah*-nya. Manusia yang mampu memungsikan potensi *'aql* dan *nafs muthmainnah* berposisi sebagai da'i. Sementara manusia yang memfungsikan *nafs lawwāmah* dan *nafs ammarāh*-nya berposisi sebagai *mad'u* (sasaran dakwah), dengan kualifikasi yang beragam, yakni *al-dhālin*, *al-kāfirūn*, *al-musyrikūn*, *yahudi*, *nashrani*, *al-mujrimūn*, *al-'awam*, *al-'uqala*, dan *al-mutawasithīn*. Dalam merespons materi dakwah yang disampaikan da'i, *mad'u* (sasaran dakwah) memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak pesan dakwah, dan hasil pilihannya itulah yang kelak akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah.

Ciri-ciri profesional dan profesionalisme da'i di atas sejalan dengan pesan moral al-Qur'an surat al-Muddatstsir (74) ayat 1-7 yang dengan tegas memerintahkan Rasulullah Saw. agar dakwah dilaku-

---

<sup>18</sup> Syukriadi Sambas, *op. cit.*, hlm. 21.

kan dalam kondisi yang sangat prima, dalam keadaan siap dan bangun, yang mengandung makna siap fisik dan mental. Karenanya, jika profesional atau profesionalisme dikaitkan dengan keahlian dan disiplin moral tertentu, maka dakwah yang dilakukan Rasulullah Saw. secara tegas telah memenuhi unsur profesional atau profesionalisme tersebut.

#### **D. Nilai Tauhid dan Profesionalisme Da'i**

Berdasar sejumlah doktrin yang terkandung dalam al-Qur'an, seperti beberapa di antaranya telah disebutkan di atas, menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang amat mementingkan profesionalisme. Islam mengajarkan bahwa apapun pekerjaan (profesi) yang ditekuni harus dilakukan secara profesional, dalam arti pekerjaan itu harus dilakukan secara benar, dan itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli di bidang pekerjaan itu. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa setiap penunaian pekerjaan yang ditekuni harus mengandung unsur transenden di dalamnya. Dalam arti pekerjaan itu dilakukan karena Allah. "Karena Allah" maksudnya karena diperintahkan Allah. Jadi, pekerjaan dalam Islam harus dijalani karena merasa bahwa itu adalah perintah Allah. Sekalipun dalam kenyataannya pekerjaan itu dilakukan untuk manusia, akan tetapi niat yang mendasarinya adalah perintah Allah.<sup>19</sup>

Keharusan penyertaan nilai-nilai transenden ini mengisyaratkan pentingnya nilai tauhid dalam menjalankan pekerjaan dalam Islam, termasuk pekerjaan atau profesi sebagai da'i. Nilai tauhid yang tertanam pada diri da'i tidak hanya mampu menjadikan para da'i berjiwa merdeka dan mandiri, tapi juga mampu menjadi pendorong para da'i untuk melakukan gerakan dakwah secara profesional. Pengakuan kebenaran yang tulus atas ungkapan *lā ilāha illallāh* yang berarti "tidak ada Tuhan kecuali Allah" merupakan deklarasi kemerdekaan

---

<sup>19</sup> Ahmad Tafsir, *op. cit.*, hlm. 113.

kaan yang paling tinggi (*the ultimate declaration of independence*) bagi para da'i. Deklarasi inilah yang membebaskannya dari segala macam bentuk perbudakan dan penjajahan, termasuk penjajahan hawa nafsunya sendiri dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya di masyarakat.

Dengan demikian, seorang da'i yang telah istiqamah dalam ber-tauhid akan merasakan seluruh hidup dan aktivitasnya tidak lain sebagai ibadah kepada Allah. Pribadi seperti ini akan mempunyai sikap dan karakter tanggung jawab yang tinggi, jujur, amanah, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko, optimis dan berorientasi ke masa depan, di samping ia mempunyai jiwa yang teguh, sabar, dan takwala kepada Allah. Sifat-sifat atau karakter seperti inilah yang tidak lain merupakan sifat-sifat atau karakter dari seorang yang profesional.<sup>20</sup>

Mentauhidkan Allah dalam maknanya yang benar, niscaya akan menjadikan seseorang memiliki sikap dan sifat yang baik dan terpuji. Ia akan menjadi manusia yang optimis, karena meyakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu itu ketentuannya berada dalam kekuasaan Allah. Ia akan menjadi orang yang berani dan percaya diri, karena yakin sepanjang ia berada dalam kebenaran, Allah pasti akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepadanya. Ia akan menjadi seorang yang *tawadhu'* sekalipun pandai dan kaya atau berkuasa, sebab segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak lain hanyalah milik Allah Dzat yang Maha Tinggi, yang tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai ketinggian-Nya. Dengan begitu ia pasti merasa tidak patut untuk menyombongkan diri, menyombongkan ilmu, kekayaan, atau kedudukannya. Ia juga akan menjadi seseorang yang memiliki perasaan bebas dan merdeka berada di tengah-tengah umat manusia lainnya. Sebab ia yakin bahwa hanya Allah-lah yang berhak untuk ditunduki, ditaati, dan dipatuhi segala

---

<sup>20</sup> 'Abdulrahim, *op. cit.*, hlm. 93-94.

kehendak-Nya. Sepanjang manusia menyimpang dari ketentuan, petunjuk, dan kehendak Allah, maka tidak ada kewajiban untuk taat dan patuh kepadanya.<sup>21</sup>

Selain itu, mentauhidkan Allah dalam maknanya yang benar juga dapat meningkatkan kecerdasan spiritual seseorang, di mana kecerdasan itu merupakan kecerdasan tertinggi (*the ultimate intelligence*) di atas kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual, yang tentunya kecerdasan ini amat dibutuhkan oleh pribadi-pribadi yang profesional. Sikap tauhid berhubungan dengan kecerdasan spiritual karena kecerdasan merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menjalin hubungan dengan Khaliqnya. Karena itu, ciri-ciri kecerdasan spiritual amat kental dengan nilai-nilai tauhid. Misalnya, kekokohan iman yang tercermin dalam kedisiplinan dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial; pemikiran dan perilaku yang senantiasa bersandar atau berorientasi kepada dzat yang bersifat transendental; memikirkan tentang akhirat; menginternalisasi nilai-nilai luhur (utama), seperti tanggung jawab, ketulusan, keteguhan, keuletan, kehalusan, kejujuran, kesabaran, ketawakalan, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Orang yang telah bertauhid dalam maknanya yang benar akan secara bebas mampu menentukan sendiri pandangan dan jalan hidupnya menurut pertimbangan akal sehat dan kejujuran tentang apa yang benar dan salah, yang baik dan buruk, di samping akan selalu tampil sebagai seorang yang berani, penuh percaya diri, dan berkepribadian kuat. Ia berani mengatakan tentang apa yang sebenarnya, meskipun dalam jangka pendek atau selintas mengandung kemungkinan merugikan dirinya sendiri atau orang-orang yang dicintainya. Demikian pula karena kepercayaan terhadap diri sendiri

---

<sup>21</sup> Afif Muhammad (Ed.), *Tauhid*, 1986, hlm. 36.

<sup>22</sup> Muhammad Thohir, *Ayat-ayat Tauhid: Pencerahan Aqidah Tauhid Berpadu Logika Sains Iptek*, 2009, hlm. 107-108.

itu ia akan berani bersikap jujur dan adil, sekalipun terhadap mereka yang kebetulan tidak disukainya.<sup>23</sup>

Dengan demikian, berdasar analisis para pakar di atas, sikap tauhid yang benar berkontribusi positif terhadap pembentukan nilai-nilai pribadi yang positif, seperti sikap kritis, futuristik, penggunaan akal sehat (sikap rasional), kemandirian, keterbukaan, kejujuran, percaya diri, keberanian, kebebasan, dan tanggung jawab. Dimana ciri-ciri ini merupakan ciri utama dari profesionalisme atau nilai pribadi yang profesional. *Wallāhu a'lam bi al-shawāb*.

### Daftar Pustaka

- Abin Syamsudin Makmun. 2008. "Sistem Pendidikan dan Pengembangan Profesionalisme Guru", dalam Fuad A. Hamied, dkk. (Ed.), *Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusi*, hlm. 131-139. Jakarta: Kedepuitan Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama, dan Aparatur Negera Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- Amrullah Ahmad (Ed.). 1983. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.
- \_\_\_\_\_ (Peny.). 1985. *Dakwah Islam dan Transformasi Sosial-Budaya*. Yogyakarta: Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.
- Afif Muhammad. 2004. *Dari Teologi ke Idiologi: Telaah Atas Metode dan Pemikiran Teologi Sayyid Quthb*. Bandung: Pena Merah.
- \_\_\_\_\_ (Ed.). (1986). *Tauhid*. Bandung: Dunia Ilmu.
- Ahmad Tafsir. 2008. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

---

<sup>23</sup> Nurcholish Madjid, *op. cit.*, hlm. 84-85.

- Federspiel, Howard M. 1996. *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin dan H. Afandi Mochtar. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hurlock, Elizabeth B. 1986. *Personality Development*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.
- Jalaluddin Rakhmat. 2002. *Reformasi Sufistik*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Muhammad Abduh. 1989. *Risalah Tauhid*, terjemahan oleh Firdaus A.N. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Imaddudin Abdulrahim. 1993. *Kuliah Tauhid*. Jakarta: Yayasan Pembina Sari Insan.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Sikap Tauhid dan Motivasi Kerja*, dalam *Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Vol. IV. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat dan Ikatan Cendekiawan Mulsim Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Profesionalisme dalam Islam*, dalam *Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Vol. 4. Nomor 2. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Menuju Manajemen Islami*, dalam *Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Vol. 1. Nomor 1. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
- Muhammad Thohir. 2009. *Ayat-ayat Tauhid: Pencerahan Aqidah Tauhid Berpadu Logika Sains Iptek*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nurcholish Madjid. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.

- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, M.T., 1996. Menda'wahkan Islam pada Dunia.
- Samsul Munir Amin. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: AMZAH.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Syukriadi Sambas. 2004. *Risalah Pohon Ilmu Dakwah: Reformulasi Disiplin dan Subdisiplin Bidang Ilmu Dakwah*. Bandung: KP-HADID Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati dan MPN-APDI Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Indikasi Kader Da'i Profesional: Materi Kaderisasi Da'i di Perguruan Tinggi, Pesantren, SLTA, dan Kursus-kursus Dakwah Islam*. Bandung: KP-HADID Fakultas Dakwah IAIN Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Konstruksi Keilmuan Dakwah Islam Perspektif Filsafat Ilmu: Upaya Memahami dan Sosialisasi Perberlakuan Kurikulum Nasional Fakultas Dakwah Tahun 1994*. Bandung: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Sembilan Pasal Pokok-pokok Filsafat Dakwah*. Bandung: KP-HADID Fakultas Dakwah IAIN Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Pemikiran Dakwah Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar*, Disertasi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Jakarta.
- Syamsu Yusuf LN dan A. Juntika Nurihsan. 2008. *Teori Kepribadian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thomas W. Arnold. 1979. *Sejarah Dakwah Islam*, terjemahan H.A. Nawawi Rambe. Jakarta: Widjaya.
- Yudi Latif. 2000. "Menuju Transformasi Dakwah Islam I: Masih Berkatat di Lingkungan Cuap-cuap", dalam Asep S. Muhtadi dan Sri Handajani (Ed.), *Dakwah Kontemporer: Pola Alternatif Dakwah melalui Televisi*, hlm. 3-8. Bandung: Pusdai Press.
- \_\_\_\_\_. 2000. "Menuju Transformasi Dakwah Islam III: Perpustakaan sebagai Garda Informasi", dalam Asep S. Muhtadi dan Sri



Handajani (Ed.), *Dakwah Kontemporer: Pola Alternatif Dakwah Melalui Televisi*, hlm. 14-18. Bandung: Pusdai Press.

Widji Saksono. 1995. *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Wali Songo*. Bandung: Mizan.

# Tanggapan Tertulis

## 1. Asep S. Muhtadi

### Teologi Transformatif dalam Merawat Profesionalisme Da'i

Buku *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* (1983) yang disunting Amrullah Ahmad dan menjadi salah satu rujukan pemakalah, sejauh yang saya ketahui merupakan satu dari sedikit referensi yang membedah fenomena dakwah Islam dari perspektif sosiologis yang relatif lebih terbuka dan obyektif. Buku-buku dakwah yang terbit sebelumnya cenderung melihat dakwah sebagai bagian dari ajaran Islam yang “harus” ditegakkan. Karena itu, paradigmanya menjadi sangat berbeda.

Buku-buku yang disebutkan terakhir lebih menggambarkan ilmu dakwah sebagai bagian dari ilmu agama. Sementara corak kajian dakwah seperti pada tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku Amrullah Ahmad lebih memperlihatkan ilmu dakwah sebagai bagian dari ilmu sosial.

Paradigma ilmu dakwah yang menempatkan ilmu itu pada wilayah ilmu agama inilah, menurut hemat saya, yang telah mengakibatkan tersendatnya pengembangan ilmu dakwah secara lebih dinamis, meskipun fasilitas akademik telah tersedia secara lebih formal seperti dibukanya program studi atau bahkan Fakultas Dakwah hampir di seluruh PTAI di Indonesia.

Kajian dakwah dalam perspektif yang lebih sosiologis dan terbuka seperti dilakukan Amrullah Ahmad akan memberikan ruang yang lebih leluasa untuk mengembangkan konsep-konsep ataupun teori-teori. Ia memiliki peluang yang lebih besar untuk menemukan relasi-relasi ilmiah dengan sejumlah konsep, teori, dan bahkan ilmu pendukung yang dapat memperkuat kajian yang lebih luas. Sayangnya, usaha seperti itu tidak cukup berkembang dan bahkan seolah berhenti sampai buku *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* itu.

Kajian Dr. Ahmad Sarbini sebetulnya dapat dimasukkan pada upaya akademis untuk mencairkan kebekuan perkembangan ilmu dakwah. Dengan memasukkan dimensi “tauhid” yang lebih transenden ke dalam wilayah profesionalisme yang lebih profan akan dapat membuka “belantara” ilmu-ilmu naqli ke dalam wilayah ilmu aqli. Jika upaya akademis ini diteruskan maka akan membuka peluang pengembangan ilmu dakwah sebagai fenomena teologis ke dalam wilayah ilmu-ilmu sosial.

Pertanyaan sederhana saya adalah, apakah kajian Dr. Ahmad Sarbini ini juga diniatkan untuk merumuskan sebuah kontribusi akademis untuk pengembangan ilmu dakwah, atau sekedar untuk menemukan relasi antara dimensi tauhid dalam membangun sikap profesional para juru dakwah, sehingga walaupun ditemukan kontribusi pengembangan ilmu dakwah, tidak lebih hanya bersifat “kebetulan” atau sekedar implikasi yang tak disengaja.

Jika karya ini diteruskan dapat memberikan kontribusi atau menambahkan sekurang-kurangnya satu tambahan kriterium bagi sebuah profesi, yaitu nilai tauhid sebagai dimensi spiritual agar seseorang pemegang suatu profesi tetap terikat pada dimensi spiritualitas (bukan hanya sebatas adanya unsur keahlian, panggilan jiwa, ada ilmunya yang dapat dipelajari untuk menjadi seorang profesional, ada lembaga pendidikannya, ada kode etiknya, dan lain sebagainya). Guru, dokter, psikolog, misalnya, adalah di antara beberapa contoh profesi. Lalu, apakah kini da’i sudah dapat disebut sebagai sebuah profesi? Kalau “ya”, maka profesi da’i dapat menjadi profesi pertama yang memasukkan unsur spiritualitas.

Temuan contributif ini selanjutnya dapat dikaji atau diteliti lebih jauh, terutama berkaitan dengan keterujian adanya dimensi tauhid pada seorang pemegang suatu profesi. Apakah semakin kuat dimensi tauhidnya maka akan semakin baik mutu profesionalismenya, atau sebaliknya, semakin rendah muatan tauhidnya maka semakin rendah pula mutu profesionalismenya.

## 2. Nurrohman Syarif

Pada halaman 4 tertulis: “Inti gerakan dakwah adalah upaya penyadaran agar masyarakat mau mengkaji, berpikir, dan bertindak. Dengan demikian, dalam konteks ini, dakwah sama sekali bukan semata kegiatan penyampaian atau kegiatan mengindoktrinasi sesama mengenai kandungan-kandungan ajaran suci Islam, melainkan suatu gerakan penyadaran masyarakat untuk melakukan perubahan, di mana masyarakat berposisi sebagai subyek sementara posisi para da’i sebagai “fasilitator” perubahan”.

Pertanyaan saya, kalau *output* dari dakwah adalah perubahan masyarakat, maka sebagai disertasi, kiranya layak ditanyakan, teori perubahan masyarakat mana yang dijadikan titik tolak, yang akan dikembangkan, dikritisi atau ditentang? Tanpa adanya ini, maka tidak akan tampak teori “baru” yang mau ditawarkan oleh penulis. Saya pikir teori perubahan masyarakat, teori pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) atau pengembangan masyarakat (*community development*) sudah banyak ditulis orang. Saya tidak melihat teori-teori ini digunakan sebagai salah satu rujukan.

Kedua, tauhid memang diakui sebagai inti ajaran Islam. Pada saat tauhid hendak dipahami dan diterjemahkan dalam perilaku manusia, maka muncullah ilmu tauhid atau dikenal dengan sebutan teologi. Sebagai ilmu, teologi dalam Islam juga berkembang dengan segala implikasinya. Kalau dihubungkan dengan inti gerakan dakwah yang disebutkan di atas, pertanyaannya, paham teologi yang seperti apa yang cocok untuk mendukung gerakan dakwah itu?

Ketiga, terkait dengan nilai pribadi yang positif seperti *futuristic*, maka seorang dai juga dituntut memahami perubahan zaman di masa depan. Pertanyaannya, skenario perubahan seperti apa yang perlu dipahami oleh seorang da’i profesional, sehingga dia mampu menempatkan diri dan jamaahnya dalam konteks perubahan itu tanpa kehilangan spirit atau nilai tauhid yang dijadikan pijakannya. Pakar

sosiologi, banyak yang menyebutkan sekarang ini kita berada atau sedang menuju ke era *post modernism* dengan berbagai cirinya. Pertanyaan yang bisa diajukan terkait dengan model dakwah ialah: model dakwah seperti apa yang kiranya cocok dalam menyongsong era *post modernism*? Dalam cuplikan disertasi ini, saya belum melihat tawaran model dakwah yang cocok di era *post modernism* ini.

### **3. Moeflich Hasbullah Da'i Profesional**

Haruskah da'i itu profesional? Tidak ada keharusan dan tak harus mengaitkannya. Itu pengaruh pemikiran manajemen modern pada wilayah ibadah dan kewajiban agama. Profesionalisme itu fokusnya pada da'inya, sedangkan dakwah fokusnya pada perubahan umat (*mad'u*). Karena tuntutan profesional, akibatnya, da'i menjadi harus ahli dakwah. Padahal, ahli dakwah tidak berbanding lurus dengan hasilnya yaitu perubahan umat, dan menyampaikan ajaran Islam tak harus profesional.

Konsekuensi psikologis dari sebutan "ahli dakwah" atau "da'i profesional" adalah fokus pada pendakwahnya (pintar, wawasannya luas, ceramahnya menarik, menguasai retorika, faham medan dakwah, apalagi yang negatif seperti bayarannya mahal), bukan pada perubahan kesadaran umat yang menjadi tujuan dakwah. Yang terpenting dari dakwah adalah pengaruh perubahan (umat) bukan harus profesional ('*da'i*'). Pengaruh perubahan tidak mesti dihasilkan dari profesionalisme tapi, paling tidak, dari lima unsur ini: (1) keikhlasan (murni karena Allah dan untuk agama), (2) niat yang lurus (bukan komersial yang umumnya dikaitkan dengan profesional), (3) mengajak dan mengingatkan (bukan menyuruh dan tidak merasa sudah lebih baik), (4) rendah hati (tidak merasa pintar dan benar sendiri), (5) mengamalkan dulu oleh diri sendiri sebelum mendakwahkan, sehingga dakwahnya memiliki ruh dan kekuatan jiwa. Yang begitulah yang terbukti dakwahnya berpengaruh.

Bila kelima syarat itu diabaikan, dakwah tak akan ada pengaruhnya bahkan buat dirinya sendiri karena tak ada kekuatan ruhaninya (sering berdakwah tapi kesadaran diri tak ada peningkatan) yang mungkin ada pada da'i profesional. Dan bila semua itu dilanggar ada ancamannya sendiri-sendiri yang cukup berat: *innama a'malu bin niyat walikulli 'amrin manawa; kabura maqtan 'indallahi antaqulu ma la taf'alun* dan hadis Nabi dari Jundub al-Alaqiy: "Barangsiapa mencari popularitas dari amal perbuatannya, Allah akan menyiarkan aibnya, dan barangsiapa yang riya dengan amalnya, Allah akan menampakkannya riyanya.

Walhasil, tidak relevan mengaitkan istilah profesionalisme pada kegiatan dakwah karena itu hanya mantes-mantes dari pengaruh fikiran modern. Dan modernitas tak selamanya benar, manfaat dan berkah. Wallahu a'lam (Sumber: FKDU).

#### **4. Karman**

Kemarin ada komentar yang simpatik kepada saya dari Kang Gi-nanjar Kawilujengan dengan bahasa Sunda. Saya sudah menjawabnya dengan bahasa Sunda juga. Tapi, tiba-tiba komentar dan jawabannya hilang. Apa kena virus, ya? Inti komentarnya adalah menyarankan saya untuk menerima masukan yang ditulis di group ini. Sebagai mubaligh, katanya, saya harus memberi contoh.

Sebenarnya, komen-komen saya di atas tidak terkait langsung dengan aktivitas dakwah saya. Sebagai mubaligh saya tidak pernah terlibat dengan persoalan tarif-menarif. Bahkan, seperti dua minggu lalu, saya diundang oleh kawan di SMA untuk memberikan ceramah silaturahmi di kantornya. Di telpon dia bertanya tarifnya. Saya hanya menjawab dengan tertawa. Sebab, sebagai mubaligh yang lahir dari organisasi gerakan dakwah yang memiliki prinsip memberi bukan meminta, bagi saya pertanyaan itu terasa lucu. Sebab menjadi

mubaligh di sebuah gerakan dakwah, di samping suka dibayar itu pun kalau ada, sering juga disodori proposal.

Namun demikian, saya juga sangat menghargai para mubaligh lain, yang karena ingin memberi pelayanan prima kepada jamaah mereka melakukannya melalui manajemen. Dan tentu model tabligh yang dikelola secara profesional, dengan membentuk manajemen, beresiko pada adanya penambahan dana untuk manajemen. Jadi, mungkin inilah yang menyebabkan sebagian mubaligh menetapkan tarif ceramahnya.

Tulisan saya di atas juga, hanya ingin mengajak jujur kepada kita semua sehingga ketika membuat definisi tidak terlalu dipengaruhi oleh subyektivitas diri. Bagi saya mubaligh, dosen, guru, dan penggiat ilmu lainnya sama-sama pekerjaan mulia. Oleh karena itu semuanya mesti dipersiapkan dan dikelola dengan baik. Saya tidak mengerti kalau kemudian orang memilah-milah, tabligh tidak boleh profesional, sementara dosen dan guru boleh diprofesionalkan. Sehingga, terkadang melahirkan kesimpulan prematur mubaligh tidak layak meminta bayaran, sementara dosen dan guru layak menuntut bayaran karena profesional.

Padahal secara substansial pekerjaan mubaligh, dosen, dan guru sama-sama mentransformasikan ilmu dan mesti dilakukan dalam kerangka beribadah kepada Allah Swt. Bagi saya lebih menghargai mubaligh yang karena itulah satu-satunya sumber penghasilannya, meminta bayaran setelah dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisa mencerahkan dan menggerakkan masyarakat, ketimbang dosen atau guru yang katanya profesional, menuntut gaji dan hak-hak lainnya, padahal masuk kelas pun jarang bahkan tidak pernah sama sekali (Sumber: FKDU).

## 5. Abdul Syukur

### Komentar untuk Makalah Ahmad Sarbini (*Profesionalisme Dai*)

Kita masih terbiasa berpikir normatif linier-kausalitas: iman → islam → ihsan, kalau orang memiliki keimanan yang kuat maka akan melahirkan amal ibadah yang juga kuat kemudian akan melahirkan sikap dan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sosial sehari-hari. Gagasan seperti ini memang menjadi pegangan kaum agamawan, termasuk di lingkungan agama Protestan seperti yang direpresentasikan oleh Max Weber dengan bukunya *Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*, bahwa kepercayaan orang-orang Protestan terhadap doktrin kerja keras dan berhemat menjadi sumber tumbuhnya kapitalisme Eropa.

Dengan cara berpikir demikian maka tidak heran kalau para khatib dan mubaligh selalu menekankan aspek iman kepada para jamaah dengan harapan bahwa keimanan yang kuat akan membuat para jamaah beramal ibadah dan beramal saleh. Tapi itu pada level gagasan. Sehingga ketika menemui banyak orang tidak melakukan amal ibadah dan amal saleh dengan mudah diambillah kesimpulan sederhana bahwa mereka kurang memiliki keimanan.

Apakah profesionalisme dai juga diukur demikian? Ketauhidan seseorang akan melahirkan dai yang profesional? Kalau profesionalisme yang dimaksud seperti para khatib dan juru dakwah mungkin saja, tetapi kalau yang dimaksud profesionalisme seperti yang dicontohkan Rasulullah maka perlu cara pandang lain.

Berangkat dari dakwah bukan hanya sebagai tugas/kewajiban tetapi sebagai sebuah ilmu maka kita harus mulai dari realitas empiris. Artinya seorang dai yang profesional harus turun ke bumi. Untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam realitas kehidupan sosial sering terjadi *what they say* tidak selalu identik dengan *what they do*. Di sini perlunya seperti dikatakan oleh Pak Adeng seorang dai untuk belajar antro-



pologi dan sosiologi, yaitu untuk menemukan sebab-sebab atau faktor-faktor apa yang membuat masyarakat jadi demikian: mereka mengaku Islam tetapi tidak melaksanakan shalat/puasa/zakat; mereka mengaku kalau Islam itu sempurna tetapi dalam sistem ekonomi masih menganut sistem kapitalisme; mereka mengaku bahwa Islam merupakan solusi bagi kehidupan manusia tetapi mereka masih suka gontok-gontokan; dan seterusnya.

Berkaca dari kehidupan Rasulullah dakwah yang dilakukan beliau ternyata sangat fleksibel dalam arti disesuaikan dengan kapasitas berpikir orang yang didakwahi serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana dakwah itu dilakukan. Kalau cara Rasulullah yang demikian kita anggap sebagai profesional maka seorang juru dakwah selayaknya mengikuti contoh Rasul ini.

Dai ilmuwan (dai yang pernah belajar di fakultas dakwah) perlu memusatkan perhatian pada suatu komunitas yang hendak didakwahi, dan turun ke lapangan (bukan berdiri di atas podium). Ia terjun dan terlibat langsung dengan masyarakat, kemudian melakukan pemetaan (*mapping*) tentang kondisi sosial yang ada. Setelah itu mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (melakukan *need assessment*). Barulah setelah mengetahui kondisi sosial dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat ia melakukan aksinya yaitu membangun masyarakat (*community development*) yang sesuai dengan yang diharapkan agama. Dengan cara demikian maka apa yang disebut masyarakat madani (*civil society*) bukan hanya sekedar wacana yang terus-menerus mengawang-awang di atas langit, tetapi akan menjadi kenyataan.

# Makalah Pendamping

**Cik Hasan Bisri**

**Menuju ke Arah Perumusan Model Penelitian Dakwah**

## **A. Pendahuluan**

Tulisan Ahmad Sarbini tentang “Nilai Tauhid dan Profesionalisme Da’i” lebih menitikberatkan dakwah sebagai gejala teologis. Demikian pula tulisan Tata Sukayat (2014), “Dakwah dan Nilai-nilai Universalitas Islam (Membumikan Ajaran Islam Rahmat Lil’alamin melalui Kebijakan Publik)” hampir mirip. Atas perihal yang sama, beberapa tulisan yang dimuat dalam *Jurnal Ilmu Dakwah (Edisi Khusus, t.th.)* mencerminkan hal yang serupa. Tentu saja pandangan normatif-idealistic tentang dakwah menjadi menu utamanya, bila ilmu dakwah dipandang sebagai bagian dari ilmu agama Islam, yakni ilmu yang sasaran kajiannya aspek normatif dan ruhaniah dalam kehidupan umat Islam. Di sini dibutuhkan pembedaan antara dakwah sebagai entitas kehidupan umat Islam; dan ilmu dakwah yang mendeskripsikan dan menjelaskan entitas tersebut.

Uraian dan penjelasan tentang aspek normatif dan ruhaniah dalam kehidupan umat manusia, juga dapat diidentifikasi sebagai gejala sosial dan kemanusiaan. Dakwah misalnya, dapat diidentifikasi sebagai gejala sosial, baik gejala psikologis maupun gejala sosiologis dan antropologis. Kajian bimbingan dan counseling berbasis pada psikologi, sedangkan pengembangan masyarakat Islam berbasis pada sosiologi mikro. Berbagai perangkat informasi dari ketiga disiplin ilmu itu dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan dakwah dalam entitas kehidupan umat Islam, baik masa lalu maupun masa kini. Bahkan unsur informasi dan unsur metodologi ketiga di-

siplin ilmu itu dapat menjelaskan gejala dakwah secara interdisipliner. Selain itu, dapat disusun perangkat untuk menata informasi ilmiah tentang dakwah secara tepat dan akurat. Dengan cara demikian pengembangan ilmu dakwah dapat dilakukan secara terus menerus dan kaya dengan sudut pandang, sebagaimana diharapkan oleh Asep S. Muhtadi dalam tanggapan tertulis-nya. Bila hal itu dapat diwujudkan, maka ilmu dakwah akan semakin ajeg dan menjadi keluarga dalam rumpun ilmu-ilmu sosial yang inklusif.

Berkenaan dengan hal itu, tulisan ini diharapkan akan menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu dakwah, melengkapi dari apa yang sudah dicapai selama ini. Ia berisi gagasan untuk merintis perumusan model penelitian dakwah yang bersifat makro untuk dikembangkan dalam wujud model yang mikro dan praktis sehingga dapat diteladani oleh para peneliti pemula terutama mahasiswa. Perumusan model penelitian menjadi suatu keniscayaan ketika dihadapkan pada persaingan antar ilmu untuk memberi manfaat bagi pengembangan wacana ilmiah dan entitas kehidupan masyarakat manusia.

## **B. Dakwah sebagai Sasaran Penelitian**

Suatu ketika, dalam forum diskusi dosen di salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), muncul pertanyaan dari salah seorang peserta: “Dewasa ini dakwah Islamiah dilakukan melalui berbagai media, namun pencurian dan korupsi makin merajalela”. Mengapa hal itu masih terjadi? Pertanyaan itu, dapat dianggap tepat, atau salah alamat. Dipandang tepat, apabila pertanyaan itu merupakan pencerminan hasrat keingintahuan terhadap suatu gejala yang menjadi bagian dari kepeduliannya. Dan dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, secara makro, tampaknya terjadi korelasi negatif: di satu pihak kehidupan beragama (produk dakwah), secara umum, amat marak terutama dalam masyarakat kota, termasuk di kalangan pejabat pemerintahan; namun di pihak lain, korupsi amat

merajalela, sehingga muncul tuntutan reformasi, di antaranya tuntutan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang berangkai dengan kolusi dan nepotisme baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam produk lembaga tinggi negara.<sup>24</sup>

Namun, pertanyaan di atas dapat dipandang salah alamat, karena tidak akan ditemukan jawaban yang tepat dan akurat. Pertanyaan tentang gejala dakwah lebih tepat diajukan kepada da'i. Sementara itu pertanyaan tentang gejala pencurian dan korupsi lebih tepat diajukan kepada penyidik dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan. Kedua agregat sosial itu, da'i di satu pihak dan penyidik dan penuntut umum di pihak lain, tidak pernah bekerjasama dalam paket program secara instansial, meskipun keduanya menunaikan tugas serupa, *'amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al-munkar*. Da'i lebih terspesialisi menunaikan tugas *'amr bi al-ma'rūf*, yang bersifat moral-kultural. Sementara itu, penyidik dan penuntut umum lebih terspesialisasi menunaikan tugas *nahy 'an al-munkar*, yang bersifat legal-struktural.

Terlepas dari ketepatan atau kemencengan pertanyaan itu, informasi tentang hubungan antara gejala dakwah Islamiah, di satu pihak; dengan gejala deviasi atau patologi sosial, bahkan, gejala kriminalitas, di pihak lain, sangat diperlukan, baik untuk penelitian maupun untuk kebijakan publik. Tanpa informasi itu, penelitian apa pun, atau kebijakan apa pun, tidak akan memperoleh sasaran yang tepat

---

<sup>24</sup> Menyusul jatuhnya Presiden Soeharto dari puncak kekuasaan pada tahun 1998, muncul *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), yang melakukan investigasi terhadap kasus korupsi. ICW pernah mengungkapkan penggelembungan biaya (*mark up*) dalam proyek Pertamina di Balongan (Jawa Barat). Sedangkan MTI menyimpulkan bahwa keputusan presiden (kepres) yang dikeluarkan Soeharto menjadi sumber korupsi dan kolusi di masa lalu (*Tempo*, 2-8 April 2001: 25). Gejala korupsi ini semakin masif di kalangan penyelenggara negara, baik di bidang eksekutif dan legislatif maupun yudikatif (sampai ke Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akil Mochtar, 2013). Sejumlah menteri, kepala daerah, anggota DPR-RI, dan para penegak hukum menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan di Sukamiskin, Bandung.

dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia hanya akan sampai pada tuntutan terhadap dakwah dan kriminalitas, dengan penuh rasa penyesalan dan kekecewaan tanpa memahami esensinya. Berkenaan dengan hal itu, muncul pertanyaan baru: apakah gejala dakwah dan gejala kriminalitas berada dalam suatu wilayah penelitian yang sama? Apabila jawabannya: **ya**, adakah hasil penelitian tentang hal itu? Apabila jawabannya: **tidak**, di mana letak kedua gejala itu dalam pengkajian dan penelitian yang selama ini dilakukan oleh para pakar? Tampaknya, jawaban atas pertanyaan itu cenderung **tidak**, karena kedua gejala tersebut berada dalam dua wilayah penelitian yang berbeda, meskipun berpeluang untuk diintegrasikan dalam penelitian yang sama yakni penelitian interdisipliner.

Gejala dakwah Islamiah menjadi wilayah penelitian ilmu dakwah, yang kelengkapannya masih sederhana dan belum berkembang. Sementara itu, gejala kriminalitas menjadi wilayah penelitian kriminologi, yang kelengkapannya relatif mapan dan telah berkembang. Sementara itu, dari dua wilayah penelitian tersebut tidak pernah dijumpai. Penelitian dakwah tidak pernah menyentuh gejala kriminalitas. Ia cenderung diarahkan pada penelitian teknis (terapan) yang bersifat preskriptif dan eksklusif, sehingga formula abstrak, berupa hipotesis dan teori baru, yang bersifat empiris kurang diperhatikan. Sementara itu, penelitian kriminologis tidak bersangkut paut dengan dakwah. Ia lebih diarahkan pada penelitian gejala kejahatan yang bersifat empiris dan inklusif, dengan menggunakan jasa ilmu-ilmu sosial, bahkan menggunakan jasa statistika.<sup>25</sup> Sementara itu, Syed Hussein Alatas (1975), mengembangkan kajian sosiologi

---

<sup>25</sup> Kriminologi mencakup beberapa subdisiplin, yakni antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psiko dan neuro-patologi kriminal, paenologi, hieGINE kriminal dan politik kriminal, dan kriminalistik (*police scientific*). Di samping itu, berkembang beberapa madzhab, yakni: madzhab antropologi, madzhab lingkungan, madzhab biososiologi, dan madzhab spiritualitas (Lihat: Bonger, 1970). Berdasarkan penelitian ilmiah di bidang ini, dapat dirumuskan usaha penanggulangan kejahatan (Lihat: Soedjono, 1970).

korupsi (*sociology of corruption*), di luar kriminologi sebagaimana yang lazim dilakukan oleh para kriminolog.<sup>26</sup>

Tentu saja, dalam tulisan ini hanya dibicarakan mengenai gejala dakwah, tanpa menyinggung gejala kriminalitas. Hal itu dibatasi untuk memahami dan menjelaskan gejala dakwah sebagai bagian dari gejala sosial, sebagaimana tercermin dalam pertanyaan yang diajukan di atas. Fokus pembahasan lebih diarahkan pada pemancangan pilar-pilar dalam proses penyusunan dan perumusan model penelitian dakwah, yang dapat dijadikan salah satu bahan baku dalam pengembangan penelitian dakwah. Dengan sendirinya, dakwah dipandang sebagai gejala empiris yang menjadi wilayah penelitian ilmu-ilmu sosial. Tulisan ini disusun dari berbagai bahan, terutama hasil kajian meskipun dengan jumlah yang sangat terbatas. Dalam proses itu menggunakan jasa ilmu-ilmu sosial. Sedangkan formulasi model yang diajukan diadaptasi dari model penelitian salah satu pranata hukum di Indonesia, yakni peradilan Islam (Lihat: Cik Hasan Bisri, 1997: 53-66). Demikian pula dalam perumusan model ini didasarkan kepada informasi tentang gejala dakwah di Indonesia, yang diharapkan dapat dikembangkan di kawasan lain.<sup>27</sup>

Rumusan model tersebut masih bersifat makro, yang kemudian dapat dipertajam menjadi model yang spesifik. Ia terdiri atas tiga model, yaitu model penelitian relasional, model penelitian sosio-historis, dan model penelitian sistemis (mikro dan makro). Ketiga

---

<sup>26</sup> Beberapa referensi tentang korupsi yang digunakan oleh Alatas, antara lain: Ibn Khaldun (1958), Myron Weiner (1962), Herbert J. Spiro (1962), B. Noggle (1963), H. D. Lasswell dan A. A. Rogow (1963), W. F. Wertheim (1965), dan J. S. Nye (1967).

<sup>27</sup> Penelitian dakwah --dan studi Islam pada umumnya-- dengan memilih kawasan Indonesia, didasarkan kepada beberapa alasan. Pertama, umat Islam Indonesia merupakan jumlah terbesar di dunia. Ia memiliki karakteristik yang sangat unik, karena tersebar di ribuan pulau dan bertemali dengan ratusan etnis. Kedua, dakwah mencakup beragam bentuk yang melibatkan berbagai kelompok sosial. Ketiga, sangat mudah dilakukan terutama dalam mengaplikasikan model oleh sivitas akademika PTAI. Keempat, hasil aplikasi model itu dapat disusun informasi abstrak (teori dan sejenisnya) yang selanjutnya dapat digunakan bagi penelitian di kawasan lain; dan pemecahan masalah-masalah dakwah.

model tersebut merujuk kepada karakteristik wilayah penelitian dakwah. Sedangkan wilayah penelitian dakwah merujuk kepada ruang lingkup sasaran kajian ilmu dakwah. Model penelitian ini masih berupa pilarnya. Ia terdiri atas unsur sasaran penelitian, kerangka berpikir makro, dan metode penelitian yang layak digunakan. Pilar-pilar itu merupakan kerangka dasar, yang akan memperkuat bangunan ilmu dakwah, yang selama ini bagikan “tanah lempung”. Masih lembek, namun memiliki peluang untuk dibentuk dan dikembangkan secara terus menerus, sehingga menjadi ajeg.

### **C. Wilayah Penelitian Dakwah<sup>28</sup>**

Ilmu dakwah --sekurang-kurangnya unsur substansinya-- telah menemukan jatidiri. Hal itu merupakan hasil maksimal yang diraih dari berbagai pertemuan ilmiah, dalam rentang waktu yang cukup panjang. Momentum yang sangat penting, berkenaan dengan perubahan kurikulum program sarjana IAIN, diawali sejak tahun 1993 dan berlaku secara efektif mulai tahun 1995. Ada hal yang menarik dari pendapat Amrullah Ahmad (1995: 18-21) berkenaan dengan substansi ilmu dakwah.<sup>29</sup> Pertama, penjelasan tentang kaitan dan interaksi antar unsur dakwah sebagai gejala yang hidup dalam kehi-

---

<sup>28</sup> Uraian tentang wilayah penelitian dakwah dapat dilihat dalam Cik Hasan Bisri (1999: 187-198). Namun, dalam tulisan ini dikemukakan kembali secara ringkas, serta dilengkapi dengan khutbah dan penerbitan. Oleh karena ilmu dakwah diidentifikasi sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial, maka rincian wilayah penelitian dakwah pun mengacu kepada identifikasi itu.

<sup>29</sup> Identifikasi ilmu dakwah sebagai bagian dari rumpun ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu budaya, masih belum menjadi kesepakatan. Di satu pihak ilmu dakwah diidentifikasi sebagai ilmu sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Amrullah Ahmad (1995: 4). Ia terdiri atas tiga disiplin ilmu, yakni ilmu tabligh, ilmu pengembangan masyarakat Islam; dan ilmu manajemen dakwah. Sementara itu, Syukriadi Sambas (1999: 169-184) mengidentifikasi ilmu dakwah sebagai ilmu budaya (bagian dari IAI yang mandiri), sejenis ilmu ushul fiqh yang berorientasi tekstual, yang masih memerlukan pengembangan dalam kurun waktu sekitar 25 tahun. Namun kedua pandangan itu tanpa dibarengi ilustrasi yang memadai, terutama berdasarkan perkembangan produk kajian yang selama ini dilakukan. Pembahasan ilmu dakwah dari kedua pakar itu berada dalam kawasan makro, yang bersifat deduktif-normatif.

dupan umat Islam. Kedua, penjelasan tentang interaksi antara unsur dakwah dengan masalah yang muncul dalam interaksi itu serta kaitannya dengan disiplin ilmu yang mengkaji masalah yang dimaksud.

Hal itu menunjukkan bahwa, dalam dakwah, sebagai bagian dari realitas kehidupan, terdapat dua bentuk interaksi, yakni internal, antar unsur dakwah sebagai sasaran penelitian; dan eksternal, antara dakwah dengan gejala kehidupan lainnya, yang bila mungkin, relasi antara dakwah dengan kriminalitas. Berkenaan dengan hal itu, ada baiknya dipertimbangkan oleh para pakar ilmu dakwah bahwa disiplin ilmu dakwah, juga, bermakna sebagai bidang studi dakwah. Ia memiliki ciri: (1) sasaran kajiannya adalah masalah-masalah dakwah, yang dapat didefinisikan sebagai jarak antara “yang seharusnya” dengan “yang senyatanya”; (2) pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner (bukan monodisipliner) sehingga dapat digunakan jasa disiplin ilmu lain, yang juga digunakan dalam kajian kriminologis; (3) sarat nilai karena bidang studi ini bertitiktolak dari titah Allah untuk menyebarkan ajaran-Nya serta diinternalisasikan dan diwujudkan dalam kehidupan manusia.

Namun demikian, ketika wilayah penelitian dipilah, model penelitian disusun dan dirumuskan, dan kegiatan penelitian diselenggarakan, ada dua hal yang menuntut perhatian khusus. Pertama, pembatasan ruang lingkup penelitian, agar dapat dilakukan secara mendalam dan terfokus. Kedua, penentuan jarak antara peneliti dengan sasaran penelitian, agar penelitian dapat dilakukan dengan berpautan kepada kaidah dan etika ilmiah. Hal terakhir menjadi sangat penting agar penelitian dakwah atau bentuk kajian lainnya, bersifat inklusif. Apabila tidak, sulit dibedakan antara pengkajian dengan pengajian, antara produk penelitian dengan formulasi doktrin atau program dakwah.

Berkenaan dengan hal itu, dakwah, dengan beragam makna: seruan, panggilan, ajakan, penyampaian, penyebaran ajaran Islam, dan perubahan keadaan, dapat dirumuskan sebagai **apa** yang dise-



rukan atau disampaikan oleh **siapa**, kepada **siapa**, dengan **cara** bagaimana, melalui **media** apa, dan **untuk** tujuan apa. **Apa** yang disampaikan atau **siapa** yang menyampaikan, dari segi tata bahasa Indonesia memiliki makna yang sama: kalimat pasif dan kalimat aktif. Namun sebenarnya terdapat perbedaan subyek. **Apa** yang disampaikan, subyeknya ialah **apa (ajaran Islam)**. Sedangkan **siapa** yang menyampaikan, subyeknya ialah **siapa** (manusia). Penentuan subyek itu menjadi penting, ketika dilakukan identifikasi ilmu dakwah sebagai bagian Ilmu agama Islam (IAI) yang berdimensi kontekstual; dan dalam membedakan dirinya dengan ilmu komunikasi. Penempatan **apa** sebagai subyek utama dalam dakwah, yang kemudian dideskripsikan dalam pengetahuan ilmiah memberi peluang kepada ilmu dakwah untuk masuk dan mengisi bagian yang kosong dari IAI yang selama ini sulit ditembus, dengan menggunakan jasa ilmu-ilmu sosial.

Keenam unsur dakwah di atas, dalam pengetahuan ilmiah merupakan unsur substansi (obyek material) ilmu dakwah. Ia berada dalam cakupan ilmu dakwah, yang sekaligus menjadi batasannya. Dengan pembatasan itu, ilmu dakwah memiliki obyek yang jelas, dan sekaligus sebagai pengendali agar tidak “ngaranjah” kepada obyek ilmu yang lainnya, terutama ke dalam obyek ilmu pendidikan dan ilmu komunikasi. Berdasarkan sudut pandang tertentu (obyek formal), muncul disiplin utama ilmu dakwah (versi Amrullah Ahmad), yakni tabligh, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah, sebagaimana telah dikemukakan, yang telah “disepakati” dan diorganisasikan dalam empat program studi di lingkungan fakultas dakwah. Apabila unsur substansi itu dipilah lebih rinci, terdiri atas beberapa substansi utama: tabligh, khutbah, taklim, penyiaran, penerbitan, bimbingan, penyuluhan, manajemen, dan pengembangan masyarakat, yang mencakup enam unsur dakwah itu. Namun demikian, keenam unsur itu --apabila dakwah berupa kegiatan, seba-

gai perwujudan pranata dakwah,<sup>30</sup> disertai berbagai hal yang berhubungan dengannya: gagasan dan pengorganisasian-- intinya hanya tiga unsur, yakni **apa** (ajaran Islam, yang secara teknis disebut materi dakwah), **siapa** (pelaku dakwah), dan **siapa** (sasaran dakwah), yang secara kumulatif tercermin dalam kegiatan dakwah.<sup>31</sup> Adapun tujuan, metode dan media melekat pada ketiga unsur utama itu.

Tabligh adalah suatu penyampaian dan penyebarluasan ajaran Islam secara insidental, oral, massal, seremonial, bahkan kolosal. Ia terbuka bagi beragam agregat sosial dari berbagai kategori. Ia berhubungan dengan peristiwa penting dalam kehidupan manusia secara individual atau kolektif (walimah nikah, walimah khitan, walimah safar, maulid nabi, isra' mi'raj, dan ulang tahun atau milad). Ia berkaitan dengan persponsoran: perseorangan, keluarga, satuan jamaah atau instansi (pemerintah atau swasta). Tujuan tabligh dirancang oleh penyelenggara sedangkan materi tabligh disesuaikan dengan konteks perhelatan yang diselenggarakan, atau disebut juga pengajian. Sementara itu, metode tabligh bersifat monolog, yakni ceramah. Secara kultural tabligh merupakan salah satu wujud penyebarluasan ajaran Islam yang dibiasakan secara turun temurun. Sedangkan secara struktural tabligh dapat memperkuat identitas

---

<sup>30</sup> Dalam kehidupan masyarakat Muslim dakwah dapat diidentifikasi sebagai salah satu pranata sosial bercorak keislaman. Ia merupakan norma-norma dalam memenuhi kebutuhan penyebarluasan ajaran Islam di dalam masyarakat. Kebutuhan yang bersifat normatif itu mengacu, antara lain, kepada Q. S. al-Nahl: 125; al-Hajj: 67; dan al-Qashash: 87.

<sup>31</sup> Penyebutan pelaku dakwah dan sasaran dakwah sangat beranekaragam. Pelaku dakwah lazim disebut da'i, muballigh, juru dakwah, dan penyuluh. Di samping itu, dapat pula disebut sebagai penyiar, mu'allim, ustadz, pembimbing, manager, dan pengembang, atau sebutan lain yang lazim digunakan oleh masyarakat sesuai dengan bahasa dan sistem sosial yang digunakan dan dianut oleh mereka. Sedangkan sasaran dakwah dapat disebut sebagai mad'u (istilah yang tepat namun tidak tersosialisasi), mustami'i, peserta, pemirsa, dan klien, bahkan hadirin (peserta yang hadir dalam tatap muka). Sebutan itu sangat tergantung kepada bentuk kegiatan dakwah, yang dalam tulisan ini dibatasi pada sembilan bentuk: tabligh, khutbah, taklim, penyiaran, penerbitan, bimbingan, penyuluhan, pengembangan masyarakat, dan manajemen dakwah.

dan posisi diri sebagai Muslim, baik bagi penyelenggara maupun bagi *mustami'* (hadirin). Di samping itu, kemampuan orasi mubaligh dapat memperkuat solidaritas di kalangan masyarakat, yang diduga dapat mengendalikan kriminalitas.<sup>32</sup>

Khutbah adalah suatu seruan, peringatan (*tadzkirah*), **tawshiyah**, dan nasihat dari khatib kepada **mustami'** untuk menunaikan tugas hidup menurut ajaran Islam. Ia bersifat monolog, sebagai kelengkapan dalam suatu upacara, yakni dalam rangkaian shalat: khutbah jum'at, khutbah *'idayn* (*'idul fithri* dan *'idul adha*), dan rangkaian upacara perkawinan: khutbah nikah. Ia memiliki unsur-unsur tersendiri dan dilaksanakan dengan khidmat. Tampaknya, khutbah merupakan wujud dakwah yang paling awal, sejak masa Rasulullah hingga kini. Namun demikian, dalam hal tertentu, pelaksanaannya cukup bervariasi karena variasi aliran paham keagamaan, serta perkembangan aspek sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Tabligh sering juga disebut ceramah agama, atau santapan rohani. Tabligh yang menarik, biasanya bila disajikan dengan penuturan yang sederhana, dan diselingi humor. Oleh karena itu, tabligh memiliki fungsi edukasi dan hiburan (*entertainment*) terutama bagi *mustami'*.

<sup>33</sup> Suatu ketika 10 orang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ditugasi untuk mengamati dan mendeskripsikan pelaksanaan shalat *idul adha* di daerah asal mereka masing-masing, yakni Kota Bandung dan daerah-daerah sekitarnya. Dari sepuluh laporan pengamatan mahasiswa tersebut, ditemukan delapan ragam pelaksanaan shalat *idul adha* dengan gambaran sebagai berikut:

1. Shalat dilaksanakan di lapangan, jamaah terdiri atas laki-laki dan perempuan, khatib berasal dari luar kalangan jamaah, dan khutbah berbahasa Indonesia.
2. Shalat dilaksanakan di mesjid, jamaah terdiri atas laki-laki dan perempuan, khatib berasal dari kalangan jamaah, dan khutbah berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. Shalat dilaksanakan di mesjid, jamaah terdiri atas laki-laki dan perempuan, khatib berasal dari kalangan jamaah, dan khutbah berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda.
4. Shalat dilaksanakan di mesjid, jamaah terdiri atas laki-laki (dalam mesjid) dan perempuan (dalam majelis taklim), khatib berasal dari kalangan jamaah, dan khutbah berbahasa Sunda.
5. Shalat dilaksanakan di mesjid, jamaah terdiri atas laki-laki dan perempuan, khatib berasal dari kalangan jamaah, dan khutbah berbahasa Arab (tanpa terjemahan).

Taklim adalah proses pemahaman dan internalisasi ajaran Islam yang bersifat massal. Ia berbentuk pengajaran dan pengkajian reguler. Oleh karena itu, unsur-unsur taklim (pengajar, peserta, materi) relatif tetap. Peserta taklim dapat dipilah secara agregatif, berdasarkan kategori jenis kelamin: laki-laki dan perempuan; kategori umur: anak-anak dan dewasa; kategori pekerjaan: karyawan, nelayan, profesional, dan sejenisnya. Di samping itu, taklim ada yang bersifat eksklusif, yakni khusus di kalangan strata masyarakat tertentu (pengajian eksekutif), atau berdasarkan agregat sosial tertentu (kelompok pengajian aliran paham keagamaan). Tampaknya taklim lebih kohesif di kalangan perempuan dan kelompok aliran paham keagamaan. Oleh karena itu, solidaritas di kalangan mereka amat tinggi, sehingga taklim memiliki fungsi pengendalian sosial. Hal itu menunjukkan bahwa taklim secara logis, antara lain, berfungsi sebagai pencegahan kriminalitas.<sup>34</sup>

Penyiaran adalah penyebarluasan ajaran Islam dengan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran, atau sarana transmisi dengan menggunakan gelombang elektromagnetis yang diterima dengan pesawat penerima siaran radio dan televisi. Penyiaran juga bersifat massal tanpa pemilahan agregat sosial, bahkan tanpa batasan lokasi dan wilayah. Oleh karena jangkauan penyiaran itu sangat luas, diduga intensitasnya relatif rendah. Dewasa ini, setiap stasion

- 
6. Shalat dilaksanakan di mesjid, jamaah terdiri atas laki-laki sedangkan perempuan terpisah di majelis taklim, khatib berasal dari kalangan jamaah, dan khutbah berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda.
  7. Shalat dilaksanakan di mesjid, jamaah terdiri atas laki-laki dan perempuan, khatib berasal dari kalangan jamaah, dan khutbah berbahasa Sunda.
  8. Shalat dilaksanakan di mesjid, jamaah terdiri atas laki-laki (di mesjid) dan perempuan (di halaman mesjid), khatib berasal dari kalangan jamaah, dan khutbah berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda.

<sup>34</sup> Penelitian Tjondronegoro (1984), antara lain, di beberapa desa Kecamatan Cibadak, Sukabumi (di samping di Kendal, Jawa Tengah), menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat desa solidaritas sosial yang paling kohesif adalah pada kawasan kampung (*lembur*). Hal itu merupakan sumbangan dari kelompok-kelompok pengajian yang berskala kecil, yang diselenggarakan secara rutin dan sederhana.

radio dan televisi memiliki program dakwah, dengan frekuensi dan durasi yang bervariasi. Mereka yang terlibat dalam program tersebut berasal dari berbagai kalangan: pejabat, cendekiawan, dan profesional.<sup>35</sup> Pada setiap bulan Ramadhan frekuensi dan durasi penyiaran dakwah melalui televisi lebih tinggi, dengan mata program yang bervariasi: monolog, dialog, film cerita, liputan perjalanan, siaran langsung shalat tarawih, dan kuis berhadiah. Di samping itu, dewasa ini, bermunculan bentuk penyiaran yang dilakukan melalui jaringan situs (*website*), yang dapat diakses melalui internet yang memiliki jangkauan global-internasional.

Penerbitan adalah penyebaran ajaran Islam melalui tulisan dengan menggunakan jasa teknologi grafika, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Semakin berkembang teknologi itu, maka semakin luas jangkauan sebaran tulisan tersebut. Dewasa ini terdapat beragam produk penerbitan sebagai media cetak yang bersifat massal, yaitu buku, majalah, surat kabar, dan bulletin. Melalui berbagai media itu substansi ajaran Islam disebarluaskan dengan menggunakan berbagai bahasa: lokal, nasional, dan internasional. Tradisi membaca, berdialog, dan menulis di kalangan ulama, sebagai perumus doktrin Islam --terutama akidah, syari'ah, dan akhlak-- merupakan modal dasar dalam pengembangan dakwah dalam bentuk penerbitan. Dewasa ini tersebar berbagai buku, majalah, dan surat kabar yang bermuatan materi dakwah dengan frekuensi yang sangat tinggi. Di samping itu, terdapat beberapa penerbit, yang menspesialisasikan dirinya sebagai pengemban misi dakwah tanpa mengabaikan aspek komersial dan mutu penerbitan. Hal itu memberi peluang kepada da'i-penulis untuk menyebarluaskan gagasan dan pesan dakwah dalam jangkauan yang sangat luas.

---

<sup>35</sup> Beberapa tulisan tentang dakwah Islam melalui media televisi dapat dibaca dalam Asep S. Muhtadi dan Sri Handayani (1420 H./2000 M.).

Bimbingan adalah suatu proses internalisasi ajaran Islam secara spesifik dan isoteris di kalangan masyarakat tertentu. Ia menampilkan hubungan personal antara pembimbing dengan terbimbing. Ia berorientasi pada pemecahan masalah individual yang dialami oleh terbimbing, sedangkan pembimbing (*mursyid*) memberikan bantuan untuk mencari jalan pemecahan masalah tersebut. Ketika kehidupan manusia semakin rumit dan pelik yang sarat dengan persaingan dan berbagai konflik kepentingan, bimbingan keagamaan menjadi salah satu kebutuhan hidup. Hal itu tampak dalam berbagai organisasi tarekat, bimbingan ibadah haji, bimbingan membaca Qur'an, dan konsultasi individual secara tatap muka maupun melalui media massa (radio, televisi, dan surat kabar), yang dilakukan secara dialogis (lisan atau tulisan).

Penyuluhan adalah penyebarluasan dalam proses pengamalan ajaran Islam di kalangan agregat tertentu tentang suatu pesan tertentu. Pesan itu merupakan paket program yang dirancang oleh penyelenggara atau pengelola dakwah. Ia dirancang secara bertahap sampai pada perolehan tujuan atau target tertentu. Di Indonesia, gejala penyuluhan agama relatif jarang terjadi, berbeda dengan penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana.

Pengembangan masyarakat adalah transformasi ajaran Islam dalam bentuk aksi kemasyarakatan. Ia merupakan suatu pengorganisasian potensi sosial yang diarahkan pada suatu kondisi tertentu, dengan merujuk kepada aspek normatif dan aspek empiris yang bersifat kondisional. Ia dirancang secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan itu disusun dalam jangka tertentu: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang diorganisasikan oleh organisasi kemasyarakatan atau oleh pesantren, misalnya, dapat diklasifikasi sebagai bagian dari pengembangan masyarakat. Hal terakhir menunjukkan bahwa pesantren, selain sebagai penyelenggara pendidikan,

dalam hal tertentu, juga merupakan pusat pengembangan masyarakat.

Manajemen dakwah adalah penataan penyebarluasan ajaran Islam, dengan menggunakan prinsip dan komponen manajemen secara umum. Intinya, menggerakkan berbagai komponen dalam suatu jalinan kerja sama yang diorganisasikan. Tentu saja manajemen dakwah memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan manajemen perusahaan dan manajemen pemerintahan. Ia sangat tergantung kepada watak organisasi, yang dasar orientasinya bersifat normatif dan keterlibatannya didasarkan atas tanggung jawab moral.

Tabel 1: Gambaran Makro Wilayah Penelitian Dakwah

Bentuk Dakwah	Substansi Dakwah		
	Gagasan (A)	Kegiatan (B)	Organisasi (C)
1. Tabligh	A1	B1	C1
2. Khutbah	A2	B2	C2
3. Taklim	A3	B3	C3
4. Penyiaran	A4	B4	C4
5. Penerbitan	A5	B5	C5
6. Bimbingan	A6	B6	C6
7. Penyuluhan	A7	B7	C7
8. Pengembangan Masyarakat	A8	B8	C8
9. Manajemen	A9	B9	C9

Uraian di atas menggambarkan tentang gejala dakwah dengan menempatkan ajaran Islam sebagai subyek, yang mengandung beberapa aspek, yakni konsep dasar (gagasan), kegiatan, dan pengorganisasian. Ketiga aspek itu, bertumpu pada kegiatan atau peristiwa dakwah, yang dijadikan alasan bahwa dakwah merupakan obyek

ilmu dakwah yang diidentifikasi sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, gambaran di atas menunjukkan bahwa wilayah penelitian dakwah terbentang dengan luas sebagaimana diperagakan dalam Tabel 1.

Wilayah penelitian dakwah sebagaimana diperagakan masih bersifat garis besar. Di dalamnya terdapat unsur dakwah sebagaimana telah dikemukakan. Intinya ajaran Islam, pelaku dakwah, dan sasaran dakwah. Apa yang tertera di atas dapat disilang dengan unsur dakwah tersebut, sehingga mencerminkan wilayah penelitian yang lebih spesifik. Tentu saja, apa yang disusun dan diuraikan merupakan gambaran tentang wilayah penelitian yang didasarkan pada pandangan bahwa dakwah didefinisikan sebagai kegiatan atau peristiwa. Hal itu membuka kemungkinan perumusan lain, yang didasarkan pada pandangan yang beragam (Lihat: Syukriadi Sambas, 1999: 169-184; Asep Saeful Muhtadi, 2003).

#### **D. Peragaan Model Penelitian**

Pemilahan wilayah penelitian dakwah di atas merupakan titik tolak dalam penyusunan dan perumusan model-model penelitian yang dapat digunakan secara praktis. Namun demikian, apa yang disajikan dalam tulisan ini baru berupa pilar-pilar menuju ke arah perumusan model penelitian yang sesungguhnya. Ia merupakan perumusan model makro untuk dikembangkan menjadi model yang praktis itu. Berkenaan dengan hal itu, dalam uraian di bawah terbatas pada tiga unsur utama, yang terdiri atas: unsur wilayah penelitian makro (dakwah secara umum), unsur kerangka berpikir yang dapat digunakan, dan unsur metodologi yang dapat dipilih dan digunakan. Dengan ketiga unsur itu, diharapkan, dakwah dapat dipahami, digambarkan, dan dijelaskan menurut sudut pandang tertentu, yang didasarkan kepada satu atau beberapa teori tertentu;



dan untuk tujuan tertentu. Dengan perkataan lain, penelitian dakwah dapat dilakukan dengan beranekaragam model atau pola.

### **1. Model Penelitian Relasional**

Model penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara dakwah dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat secara makro. Misalnya, penelitian mengenai “Perkembangan Dakwah di Indonesia pada Era Orde Baru (1966-1998)”<sup>36</sup> Ia mencakup beberapa unsur yang saling berhubungan, yaitu: (1) landasan ideal dakwah dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia; (2) perubahan masyarakat, dengan berbagai variasi dan kecenderungannya; (3) politik dakwah sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara negara (kebijakan nasional, kebijakan pembangunan, kebijakan sektoral, dan kebijakan teknis); (4) kesinambungan dakwah dalam kehidupan masyarakat; (5) interaksi antar elite masyarakat, yakni antar elite Islam (ulama independen, birokrat agama, pemimpin organisasi kemasyarakatan, dan cendekiawan Muslim); (6) pengembangan dakwah sebagai sentral. Keenam unsur itu memiliki variasi hubungan, yaitu hubungan fungsional, hubungan searah (kausal), dan hubungan timbalbalik.

Dalam model penelitian ini, perkembangan dakwah ditempatkan sebagai penerapan konsep ideal tentang dakwah, yang dideduksi dari ajaran Islam, untuk disebarluaskan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan (pembangunan). Dalam

---

<sup>36</sup> Makna era Orde Baru dalam tulisan ini, tanpa penilaian baik atau buruk. Ia merupakan suatu masa yang pernah dialami dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dewasa ini, pada era Reformasi, makna Orde Baru bersifat derogatif atau ejekan, yang digunakan untuk menyudutkan suatu rezim, bahkan, terkadang, orang tertentu. Hal itu dapat dimaklumi karena penamaan Orde Baru sebagai antitesis terhadap Orde Lama, suatu tatanan yang tidak dikenal sebelum era Orde Baru. Ketiga era itu memiliki jargon --yang terkadang menjadi mitos-- yang sama, yaitu progresif revolusioner (Orde Lama), pembangunan (Orde Baru), dan reformasi total (Orde Reformasi). Ketiga jargon itu makna dan semangatnya adalah sama, yakni perubahan sosial, yang dalam beberapa hal, memiliki kesamaan dengan makna dan semangat dakwah.

proses itu terjadi berbagai relasi antar unsur yang terfokus pada perkembangan dakwah dalam suatu era tertentu. Ia digambarkan dan dijelaskan dengan menggunakan kerangka berpikir sebagaimana berikut ini. Pertama, konsep dakwah merupakan kompleks normatif, yang didasarkan kepada kebenaran ajaran Islam, berkenaan dengan keyakinan (akidah), penataan kehidupan manusia dalam arti luas (syari'ah), dan perilaku terpuji (akhlak). Hal itu digali dari sumber ajaran Islam, yakni Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dirumuskan oleh para pemikir, yang menjadi rujukan dalam interaksi antar elite Islam dan pengembangan dakwah.

Kedua, ajaran dakwah itu berhubungan secara fungsional dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah; dan perubahan masyarakat pada tingkat lokal maupun nasional, yang tercermin dalam wujud perkembangan masyarakat Islam yang bersifat mejemuk. Kebijakan pemerintah mencakup kebijakan pembangunan secara umum, kebijakan sektoral, mencakup pembangunan bidang agama, dan kebijakan teknis berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan bidang agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>37</sup> Sementara itu, kemajemukan masyarakat Islam di Indonesia itu, oleh karena Muslim terdiri atas berbagai etnis yang tersebar di seluruh wilayah nusantara; dan terdiri atas berbagai strata, kelompok kepentingan, dan aliran paham keagamaan.

Ketiga, kebijakan pemerintah itu merupakan suatu produk interaksi antar elite Islam, dan antara elite Islam dengan elite penguasa, dalam hal ini pemerintah, melalui hubungan yang saling mengun-

---

<sup>37</sup> Pelaksanaan kebijakan pemerintah itu berupa berbagai peraturan produk pemerintah (peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga non-kementerian, dan peraturan di bawahnya sampai tingkat pemerintah daerah) berkenaan dengan penyelenggaraan dakwah. Secara praktis hal itu tampak dalam perizinan dan pengawasan bagi dan terhadap penyelenggaraan dakwah terutama da'i, yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban masyarakat (polisi). Boleh jadi hal itu merupakan relasi antara dakwah dengan kriminalitas, meskipun yang lebih menonjol adalah kepentingan politik.

tungkan.<sup>38</sup> Interaksi antar elite Islam, bahkan tipologi elite dalam struktur masyarakat Islam Indonesia, merupakan produk perubahan sosial secara makro yang bertemali dengan landasan kultural yang dianut, yakni aliran paham keagamaan yang mendunia: madzhab sunni, yang memiliki landasan ideal dakwah.<sup>39</sup> Sementara itu, interaksi antar elite Islam berhubungan dengan kesinambungan dakwah yang telah berakar dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing memiliki pengaruh terhadap perkembangan dakwah secara keseluruhan.

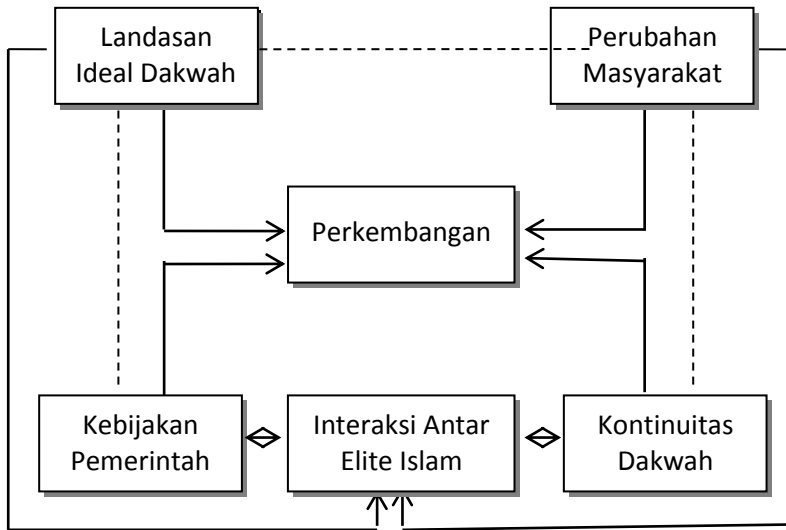
Keempat, watak alami dan bersifat abadi yang melekat pada masyarakat (dalam hal ini umat Islam Indonesia) ialah mengalami perubahan, baik strukturnya maupun pola budayanya. Perubahan itu mengandung makna kesinambungan dan pengembangan ajaran Islam, yang diwariskan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sementara itu, perubahan masyarakat dilakukan secara nasional dan regional, disengaja, berencana, dan berjangka (pendek, menengah, dan panjang), yang secara konkret dirumuskan dalam bentuk rencana dan program aksi. Hal itu berhubungan dengan berbagai faktor perubahan sosial yang konstan.

---

<sup>38</sup> Kerangka berpikir serupa, berkenaan dengan perkembangan peradaban Islam di Indonesia, dapat dilihat dalam Cik Hasan Bisri (1997: 93-120; dan 2000: 69-78).

<sup>39</sup> Dalam struktur masyarakat Islam sunni, elite Islam muncul atas pengakuan terhadap kepemimpinan mereka sebagai produk interaksi dengan para pengikutnya, tanpa instansi resmi yang mencakup secara nasional maupun internasional. Dengan perkataan lain, lebih berbasis kultural ketimbang struktural, kecuali pejabat agama. Oleh karena itu, tidak dikenal pemimpin Islam bagi seluruh Muslim dalam satuan masyarakat bangsa. Yang ada adalah pemimpin organisasi kemasyarakatan berbasis Islam yang berorientasi nasional (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, Mathla'ul Anwar, Alwasliyah, dan lain-lain) atau pemimpin aliran paham keagamaan yang lebih spesifik. Namun demikian, berdasarkan aliran paham keagamaan ini (sunni) dapat dirumuskan beberapa proposisi: (1) aliran paham keagamaan menjadi landasan kultural di kalangan Muslim; (2) landasan kultural itu menjadi rujukan dalam agregasi dan artikulasi politik; (3) artikulasi politik dilakukan melalui proses perumusan dan penetapan kebijakan dakwah.

Gambar 1: Unsur-unsur Model Penelitian Relasional  
(Perkembangan Dakwah di Indonesia pada Era Orde Baru)



Keterangan:

- Hubungan kausal
- ↔ Hubungan timbalbalik
- - - Hubungan fungsional

Kelima, secara kumulatif berbagai hubungan antara landasan ideal dakwah dan interaksi antar elite Islam di satu pihak; dengan perubahan masyarakat dan kebijakan pemerintah di pihak lain, diwujudkan dalam bentuk perumusan kegiatan dakwah, yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga menunjukkan pola dan dinamika dakwah. Hal itu tampak dalam bentuk tabligh, khutbah, ta'lim, penyiaran, penerbitan, bimbingan, penyuluhan, pengembangan masyarakat, dan manajemen dakwah. Kegiatan dan peristiwa dakwah dalam beragam bentuk itu mencerminkan suatu sosok berkembang-

an dakwah dalam era tertentu (Orde Baru), serta kecenderungannya pada era berikutnya (Era Reformasi).

Perkembangan dakwah dalam model ini, ditempatkan sebagai unsur yang terikat (*dependent variable*) dan dipandang sebagai suatu proses yang secara terus menerus bergulir tanpa henti. Dalam proses itu terdapat tahapan-tahapan yang dapat dideskripsikan dan dijelaskan dengan cara menghubungkan antar unsur dakwah. Selanjutnya, dengan menggambarkan unsur-unsur itu dapat dilakukan berbagai penelitian, atau penelitian yang lebih operasional, spesifik, dan berskala mikro yang merujuk kepada model tersebut. Tentu saja gejala dakwah yang bervariasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam kawasan yang luas itu, dapat digambarkan dan dijelaskan secara sistematis yang dengan sendirinya akan memperkaya khazanah ilmu dakwah.

Berkenaan dengan hal di atas, dapat dipilih dan digunakan beberapa metode penelitian, baik terhadap keseluruhan unsur sebagai satuan analisis; atau terhadap masing-masing unsur yang dipandang sebagai satuan analisis yang berbeda. Apabila perkembangan dakwah dipandang sebagai satuan analisis, maka dapat digunakan beberapa metode penelitian yang diintegrasikan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian itu dapat digunakan metode penelitian historis, metode penelitian analisis isi, dan metode penelitian survai. Metode penelitian historis digunakan untuk menjelaskan kontinuitas dakwah pada era Orde Lama dan perkembangan dakwah pada era Orde Baru yang dijadikan fokus penelitian.<sup>40</sup> Hal itu dilakukan me-

---

<sup>40</sup> Beberapa hasil penelitian tentang politik dan Islam di Indonesia pada era Orde Baru, dapat dibaca antara lain dalam: Muhammad Atho Mudzhar (1990), *"Fatwa's" of the Council of Indonesian Ulama, 1975-1988*; Lubis (1995), "Institutionalization and the Unification of Islamic Courts under the New Order"; Din Syamsuddin (1995), "The Muhammadiyah Da'wah and Allocative Politics in the New Order"; Faisal Ismail (1996), "Pancasila as the Sole Basis for All Political Parties and for All Mass Organizations: An Account of Muslims Respons"; Marzuki Wahid (1999), "Konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Pengaruh Politik Orde Baru

lalui pengkajian dokumen, hasil penelitian, dan pemberitaan surat kabar. Metode penelitian analisis isi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara landasan ideal dakwah dan kebijakan pemerintah dengan perkembangan dakwah, yang digali dari bahan pustaka, dokumen organisasi kemasyarakatan, peraturan perundang-undangan (peraturan pemerintah ke bawah), dan pemberitaan surat kabar.<sup>41</sup> Metode penelitian survai digunakan untuk menjelaskan tentang interaksi antar elite Islam dan interaksi antara elite Islam dengan pemerintah, melalui wawancara terstruktur dengan para elite yang terpilih sebagai responden.<sup>42</sup>

## 2. Model Penelitian Sosio-Historis

Model penelitian ini dititikberatkan pada kronologi pertumbuhan dan perkembangan dakwah dalam suatu rentangan waktu dan lokasi tertentu, atau dalam suatu lingkaran kebudayaan (etnis) tertentu, yang lebih ditekankan pada unsur-unsur internal. Misalnya, tentang dakwah pada masa kesultanan di kawasan Aceh, Banten, Mataram, dan kawasan lainnya; dakwah pada masa penjajahan Belanda; dan dakwah pada awal dan pasca kemerdekaan. Dakwah yang dilakukan Walisanga, sebagaimana yang digambarkan oleh Widji Saksono (1995), merupakan salah satu hasil penelitian model ini, dengan fo-

---

terhadap Kompilasi Hukum Islam”; dan Moeflich Hasbullah (2000), “Cultural Presentation of the Muslim Middle Class in Contemporary Indonesia”.

<sup>41</sup> Analisis isi (*content analysis*) yang biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi (surat kabar) dengan pendekatan kuantitatif, dapat dimodifikasi untuk memahami teks lain (bahan pustaka, dokumen organisasi, dan peraturan perundang-undangan) dengan pendekatan kualitatif. Khusus tentang peraturan perundang-undangan, dapat digunakan beberapa metode penafsiran, di antaranya metode penafsiran teleologis dan penafsiran historis-sosiologis. Penggunaan metode analisis isi tentang budaya politik dan pembangunan ekonomi pada era Orde Lama dan Orde Baru dilakukan oleh Widjaja (1982).

<sup>42</sup> Karakteristik dan tahapan kerja ketiga metode penelitian itu, dapat dibaca dalam Hasan Usman (1986, metode sejarah); Krippendorff (1986, metode analisis isi); Singarimbun dan Sofian Effendi (1982, metode survai); dan Nur Syam (1991, metode survai).

kus pada pelaku dakwah (da'i), sebagai tokoh sejarah. Di samping itu, perkembangan dakwah dalam kawasan yang lebih terbatas dan dalam jangka waktu yang lebih pendek, dapat menggunakan model ini. Misalnya perkembangan dakwah di kawasan pemukiman transmigran Gedong Tataan (Lampung) dan Wonomulyo (Sulawesi Selatan), dalam lingkungan kampus perguruan tinggi, dalam lingkungan instansi pemerintahan dan perusahaan swasta.

Masing-masing unsur tersebut, dapat dideskripsikan sebagaimana dikemukakan dalam model penelitian relasional di atas. Berdasarkan deskripsi tersebut, disusun kerangka berpikir dengan rumusan sebagaimana berikut ini. Pertama, dakwah merupakan suatu penyebaran ajaran Islam yang dilakukan oleh da'i, atau sekelompok da'i yang terorganisasi, yang mulai tumbuh dan berkembang sejak awal perkembangan Islam di Indonesia (secara makro). Kedua, penyebaran ajaran Islam itu dilaksanakan dalam berbagai lingkungan masyarakat (lokal dan nasional) menyakup berbagai agregat sosial, dengan beragam bentuk dan penampilan. Ketiga, penyebaran ajaran Islam itu dilakukan secara terus menerus tanpa henti, sehingga menjadi tradisi dalam berbagai lingkungan masyarakat dan bersesuaian dengan karakteristik da'i. Keempat, penyelenggaraan dakwah diorganisasikan sesuai dengan karakteristik sasaran, karakteristik da'i, dan perkembangan pengorganisasian masyarakat. Kelima, corak penyelenggaraan dan perkembangan dakwah dalam berbagai lingkungan masyarakat itu memiliki karakteristik, visi, bentuk, dan intensitas yang beranekaragam. Dengan perkataan lain, penampilan dan perkembangan dakwah bersifat variatif.

Dengan kerangka berpikir tersebut dapat dilakukan penelitian hubungan antara dua unsur, atau lebih, dalam suatu rentang waktu dan kawasan tertentu, baik aspek-aspek statisnya maupun aspek-aspek dinamisnya. Dalam cakupan yang mikro itu, dapat digunakan sebagian dari kerangka berpikir sebagaimana telah di rumuskan di atas. Selanjutnya, pada model penelitian lebih tepat dilakukan de-

ngan menggunakan metode penelitian sejarah. Sementara itu, metode analisis isi dapat ditempatkan sebagai unsur penunjang. Ia berposisi sebagai cara kerja untuk memahami sumber-sumber tertulis yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

### **3. Model Penelitian Sistemis**

Penelitian model ini dititikberatkan pada deskripsi dan relasi berbagai unsur dakwah yang dipandang sebagai suatu kesatuan sistem. Secara mikro, ia merupakan suatu sistem yang otonom. Sedangkan secara makro, ia merupakan bagian dari suatu sistem masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, baik sistem mikro maupun makro, secara umum dapat didefinisikan dengan rangkaian rumusan sebagai berikut ini. Pertama, sistem merupakan suatu keseluruhan, yang terdiri atas beberapa subsistem (unsur). Kedua, masing-masing subsistem berada dalam susunan kesatuan sistem dan memiliki fungsi tertentu. Ketiga, antara subsistem yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, saling menunjang, bahkan saling tergantung. Keempat, manakala seluruh subsistem itu berfungsi, maka keseluruhan sistem mengalami kejegan dan keseimbangan. Kelima, manakala salah satu subsistem tidak berfungsi, maka akan berpengaruh terhadap subsistem lainnya, bahkan terhadap seluruh kesatuan sistem sehingga sistem itu mengalami disfungsi.

Masing-masing unsur dalam sistem dakwah dapat dideskripsikan, baik aspek statisnya maupun aspek dinamisnya. Apabila akan dideskripsikan aspek dinamisnya, ia dilihat sebagai metode yang bermuara pada tujuan; atau dilihat sebagai proses yang menggambarkan interaksi antar unsur. Berkenaan dengan hal itu, dapat dilakukan penelitian evaluasi. Apabila dakwah dilihat sebagai metode, maka digunakan metode penelitian evaluasi sumatif, yang dititikberatkan pada pencapaian tujuan, tentang apa yang telah dirancang dan apa yang dapat dicapai, dengan catatan bahwa yang dicapai itu diukur berdasarkan cara pengukuran tertentu: kriteria dari tujuan



yang ditetapkan, indikator masing-masing kriteria tersebut, dan tolok ukur yang digunakan. Apabila dakwah dilihat sebagai proses, maka digunakan metode penelitian evaluasi formatif yang mendeskripsikan kontribusi masing-masing unsur. Boleh jadi sebagian unsur menjadi faktor penunjang dalam proses itu, atau sebaliknya ia menjadi faktor penghambat terhadap berfungsinya sebagian atau seluruh unsur dalam sistem tersebut.

Dalam penelitian model sistemis ini, dakwah dapat diposisikan dalam sistem masyarakat secara makro. Hal-hal yang dapat dideskripsikan melalui penelitian, misalnya tentang hubungan antara dakwah dengan perkembangan ekonomi, hubungan antara dakwah dengan perkembangan politik, hubungan antara dakwah dengan perkembangan teknologi komunikasi massa, hubungan antara dakwah dengan pendidikan, hubungan antara dakwah dengan penanggulangan kriminalitas, di luar sistem ketertiban dan keamanan masyarakat, dan seterusnya. Adapun metode penelitian yang dapat digunakan di antaranya yang dapat digunakan dalam penelitian terhadap unsur dakwah, sebagaimana dikemukakan di atas.

Tentu saja, masih dapat dilakukan penelitian terhadap satu atau dua unsur dakwah itu. Manakala hal itu dilakukan, ia dapat disebut sebagai model penelitian aspektual. Misalnya, penelitian tentang hubungan antara da'i dengan sasaran; hubungan antara da'i dengan materi dakwah; hubungan antara da'i dengan metode dakwah yang digunakan. Dalam model penelitian ini dapat digunakan metode penelitian survai atau metode penelitian studi kasus.

Apa yang dirumuskan (proposisi) di atas merupakan penyederhanaan dari suatu realitas dakwah dalam masyarakat bangsa Indonesia, yang sangat abstrak dan rumit. Dalam penyederhanaan itu sarat dengan asumsi dan reduksi, sehingga terdapat celah-celah kekurangan untuk disempurnakan. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka berpikir makro itu, dapat diturunkan menjadi kerangka berpikir menengah (meso) dan kerangka berpikir kecil (mikro) yang di-

gunakan bagi fokus penelitian tertentu. Misalnya, perkembangan ta'lim atau perkembangan penerbitan, dalam suatu masa dan kawasan tertentu yang lebih spesifik.

## **E. Penutup**

Uraian yang telah dikemukakan merupakan salah satu bagian yang sangat kecil dari suatu gugusan penelitian dakwah. Ia ditulis secara sepintas oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk dakwah. Ia juga ditulis oleh orang yang tidak pernah terlibat dalam penelitian dakwah. Namun demikian, disadari bahwa mengembangkan model penelitian dakwah merupakan salah satu kebutuhan dan menjadi salah satu usaha bagi pengembangan ilmu dakwah secara makro. Siapa pun berpeluang untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dakwah, yang memiliki kawasan yang sangat luas dan terbuka untuk dilukiskan dan dijelaskan dari berbagai sudut pandang.

Pengembangan ilmu dakwah memiliki multi dimensi. Pertama, mengembangkan jati dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu atau bidang kajian. Ia membutuhkan pengembangan unsur informasi dan unsur metodologi secara konsisten dan kontinyu. Kedua, mengembangkan ilmu dakwah yang mampu memberi dasar-dasar keilmuan sivitas akademika terutama dalam lingkungan perguruan tinggi agama Islam. Ketiga, mengembangkan dirinya untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan teknologi dakwah yang semakin marak dikembangkan oleh berbagai kalangan umat Islam, yang pada akhirnya memiliki andil dalam meningkatkan kualitas hidup umat Islam.

Tahapan awal dalam pengembangan itu adalah membenahi diri sebagai ilmu yang sistemis dan memiliki landasan epistemis. Berkeanaan dengan hal itu pembenahan pemilahan dan pengelompokan dalam dirinya merupakan tuntutan yang utama. Tuntutan berikutnya adalah mengembangkan substansi ilmu itu yang secara rinci di-

lakukan melalui pengembangan wilayah penelitian yang tepat dan potensial. Ia dapat disusun sampai tingkat yang amat kecil, sehingga memberi kemudahan bagi para peneliti pemula, terutama mahasiswa program sarjana.

Tahapan berikutnya adalah pengembangan unsur informasi, mulai dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian. Dengan kegiatan itu yang dilakukan secara terus menerus, maka secara bertahap ilmu dakwah akan memiliki kelengkapan yang paling penting, yakni teori, yang diinduksi dari gejala dakwah yang sangat beranekaragam itu. Apa yang disebut sebagai teori besar yang dideduksi dari pemikiran reflektif, hanya memiliki keajegan apabila diturunkan menjadi teori menengah dan teori kecil dan diuji melalui penelitian verifikatif. Dan teori-teori kecil inilah yang akan menjadi kekayaan dan keindahan suatu bangunan ilmu, yang dapat diaplikasikan untuk memahami dan menjelaskan gejala dakwah yang lebih spesifik.

Selanjutnya, pengembangan metode penelitian, sebagai bagian amat penting dalam pembahasan ini, membutuhkan perhatian dan usaha kerja keras, agar sosok unsur metodologi ilmu dakwah semakin terang dan berdayaguna. Berkenaan dengan hal itu, ada baiknya dilakukan pengembangan model penelitian dakwah, sebagaimana telah dilakukan oleh perintisannya, ke arah yang lebih spesifik dan teknis. Dengan model penelitian itu dapat mempermudah penggunaan unsur informasi dan unsur metodologi, yang akan memberikan arah dan langkah penelitian secara sistematis. Ia juga memperjelas cakupan dan batasan penelitian, sehingga mempermudah untuk merumuskan tujuan, kegunaan, kerangka berpikir, dan metode penelitian yang akan digunakan. Kegunaan yang amat penting, sosok keahlian para pakar bidang dakwah akan semakin jelas, dan memiliki kemampuan untuk memayungi generasi muda yang berminat untuk bergumul dalam berbagai aspek dakwah. Manakala ia dapat dilakukan, maka secara langsung kegiatan dakwah dapat dilaksana-

kan secara nyata. Manakala hal itu dilaksanakan, ia merupakan bagian dari amal saleh yang dapat meningkatkan kualitas ketakwaan yang paralel dengan tujuan dakwah itu sendiri.

Dari uraian yang telah dikemukakan, tampak dengan jelas lapangan kerja yang sangat luas untuk mengembangkan salah satu dari berbagai unsur ilmu dakwah. Oleh karena itu, ia, memerlukan penataan yang cermat dan perumusan program yang tersusun dalam perencanaan berjangka. Harapan ini, lebih ditujukan kepada para pakar dan ilmuwan dakwah sebagai tenaga fungsional yang menggeluti bidang ini. Demikian halnya, harapan ini ditujukan kepada pengelola pendidikan tinggi di bidang ilmu dakwah yang memiliki kewajiban dan otoritas untuk mengembangkan ilmu dakwah.

Peluang ke arah itu sangat terbuka. Pertama, secara bertahap telah dilakukan pembenahan pemilahan disiplin ilmu dakwah yang memiliki landasan epistemis yang jelas. Kedua, telah disusun unsur metodologi di bidang dakwah, meskipun memerlukan pengujian secara terus menerus, baik konsistensinya maupun keandalannya untuk digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Ketiga, potensi dan komitmen tenaga yang berusia muda semakin bertambah. Ia membutuhkan pengembangan wawasan, pengelolaan, dan teknis penelitian. Keempat, kemudahan yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penelitian semakin bertambah, baik yang berasal dari PTAI maupun yang ditawarkan oleh instansi penyelenggara penelitian, yang berskala makro dan kompetitif. Kelima, mitra kerja di luar PTAI makin tersebar, baik mitra kerja dalam kegiatan penelitian maupun sebagai sumber dan pengguna dalam dan hasil penelitian. Berkenaan dengan hal itu, bendera yang perlu dikibarkan adalah tekad untuk maju dan memajukan ilmu dakwah, sambil mengikis penyakit kronis, yakni kebekuan.

Akhirnya, apa yang dikemukakan dalam tulisan ini belum menjawab pertanyaan yang diajukan pada awal tulisan. Namun dalam beberapa bagian terdapat relasi antara dakwah dengan kriminalitas.

Jawaban yang diberikan baru bersifat hipotetis, yang membutuhkan jawaban dengan data akurat yang diperoleh dari hasil penelitian. Jawaban yang diberikan bukan “ikan yang siap disantap”, tapi berupa “rajutan jala” yang dipersiapkan sebagai alat penangkap ikan di lautan kehidupan yang sarat dengan masalah dan tantangan. Masalah yang dihadapi dalam lautan kehidupan itu, memberi kesempatan kepada siapa pun yang memiliki vitalitas hidup. Ia merupakan lahan yang merangsang untuk berpikir, berkreasi, dan beramal saleh. Kegiatan berpikir, berkreasi dan penelitian menjadi salah satu ciri yang melekat dalam kehidupan akademisi. Sementara itu, produk berpikir, berkreasi, dan penelitian yang dapat disimak dan dimanfaatkan oleh orang lain, merupakan bagian dari wujud dakwah aksi yang layak dan dapat dilakukan oleh para akademisi.

### **Daftar Pustaka**

- Alatas, Syed Hussein. 1981. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Amrullah Ahmad. 1995. “Materi dan Metode Penyajian Disiplin Dakwah Islam dalam Kurikulum IAIN 1995”. Makalah disampaikan dalam Orientasi Kurikulum Nasional IAIN dan Topik Intinya, pada tanggal 18 Mei 1995, di Jakarta.
- Asep S. Muhtadi dan Sri Handajani (Editor). 1420 H./2000 M. *Dakwah Kontemporer: Pola Alternatif Dakwah melalui Televisi*, Cetakan Pertama. Bandung: Pusdai Press.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Metode Penelitian Dakwah*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Bonger, W. A. 1970. *Pengantar tentang Kriminologi* (Terjemahan R. A. Koesnoen), Tjetakan Ketiga. Djakarta: Pembangunan.
- Cik Hasan Bisri. 1997. *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- \_\_\_\_\_. 2001. *Ilmu, Pendidikan Tinggi, dan Penelitian: Wacana Pengembangan Ilmu Agama Islam*, Cetakan Pertama. Bandung: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cetakan Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Din Syamsuddin. 1995. "The Muhammadiyah Da'wah and Allocative Politics in the New Order", in *Studia Islamica: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 2 Number 2, pp. 35-72. Jakarta: IAIN, The State Institute of Islamic Studies Syarif Hidayatullah.
- Faisal Ismail. 1996). "Pancasila as the Sole Basis for All Political Parties and for All Mass Organizations: An Account of Muslims Respons", in *Studia Islamica: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 3 Number 4, pp. 1-92. Jakarta: IAIN, The State Institute of Islamic Studies Syarif Hidayatullah.
- Jurnal Ilmu Dakwah: Edisi Khusus*. t.th. Bandung: Asosiasi Profesi Dakwah Bekerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Marzuki Wahid. 1999. "Konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Pengaruh Politik Orde Baru terhadap Kompilasi Hukum Islam", dalam *Mimbar Studi* Nomor 2 Tahun XXII, Januari-April, hlm. 99-148. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mastuhu dan Deden Ridwan (Editor). 1998. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa dan Pusjarlit.
- Muhamamad Atho Mudzhar. 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Edisi Dwibahasa). Jakarta: Indonesian Netherlands Corporation in Islamic Studies.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Penyunting). 1982. *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1970. *Konsep Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kedjahatan (Crime Prevention)*, Tjetakan Kesatu. Bandung: Alumni.
- Syukriadi Sambas. 1999. "Pokok-pokok Wilayah Kajian Dakwah Islam", dalam *Mimbar Studi* Nomor 2 Tahun XXII, Januari-April, hlm. 169-184. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Tata Sukayat. 2014. "Dakwah dan Nilai-nilai Universalitas Islam (Membumikan Ajaran Islam Rahmat Lilalamin melalui Kebijakan Publik)". Makalah Disampaikan dalam Majelis Diskusi Malem Reboan, tanggal 4 Pebruari 2014. Bandung: Madrasah Malem Reboan.
- Tjondronegoro, Sediono M. P. 1984. *Social Organization and Plann-ed Development in Rural Java: Study of the Organization Phenomenon in Kecamatan Cibadak, West Java, and Kecamatan Kendal, Central Java*. Singapore: Oxford University Press.
- Widji Saksono. 1995. *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Walisongo*, Cetakan Pertama. Bandung: Mizan.
- Zaini Muchtarom. 1996. *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: al-Amin Press.